

# Pengawasan Parlementer atas Sektor Keamanan dan Gender

Ilja Luciak





# Pengawasan Parlementer atas Sektor Keamanan dan Gender

Ilja Luciak



Geneva Centre for the  
Democratic Control of  
Armed Forces (DCAF)

Tentang Penulis

Dr. Ilja Luciak adalah Dosen dan Ketua Jurusan Ilmu Politik, Institut Politeknik dan Universitas Negeri Virginia. Penelitiannya berfokus pada politik komparatif, politik Amerika Latin, teori pembangunan, gender dan demokratisasi, dan perubahan politik yang kejam. Ia telah menerbitkan sejumlah buku dan artikel mengenai berbagai isu seperti kesetaraan gender dan perjanjian perdamaian, gender dan demokrasi di negara-negara Amerika Latin, tata pemerintahan yang demokratis dan pembangunan aliansi perempuan untuk rekonstruksi pasca-perang di Amerika Tengah. Ilja mendapat gelar doktor (PhD) bidang Ilmu Politik dari Universitas Iowa.

Penyunting

Megan Bastick dan Kristin Valasek, DCAF.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak berikut atas komentar berharga mereka mengenai rancangan tool (alat) ini: Hans Born, Willem F. Van Eekelen, Mahitab Mekkawi, Rita Taphorn, Tone Tinggard, dan UN-INSTRRAW. Selain itu, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Benjamin Buckland, Anthony Drummond, dan Mugiho Takeshita atas bantuan penyuntingan mereka, dan Anja Ebnöther atas bimbingannya dalam proyek ini.

Beberapa bagian dari Tool (Alat) ini bersumber dari tulisan Ilja A. Luciak berjudul "Konflik dan Respons Parlemen Bergender," yang merupakan laporan Konsultasi yang disusun untuk proyek Program Pembangunan PBB mengenai Penguatan Peran Parlemen dalam Pencegahan dan Pemulihan Krisis, (New York: UNDP), April 2006.

Gender dan Toolkit RSK

Tool (alat) mengenai Pengawasan Parlemeter atas Sektor Keamanan dan Gender ini merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk memberikan pengantar praktis isu gender bagi para praktisi dan pembuat kebijakan reformasi sektor keamanan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tool (Alat) berikut dan Catatan Praktiknya:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender                      | 9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender |
| 2. Reformasi Kepolisian dan Gender                           | 10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender   |
| 3. Reformasi Pertahanan dan Gender                           | 11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender              |
| 4. Reformasi Peradilan dan Gender                            | 12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan                |
| 5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender                         | Lampiran Undang-undang dan Instrumen Internasional dan Regional    |
| 6. Manajemen Perbatasan dan Gender                           |  |
| 7. Pengawasan Parlemeter terhadap Sektor Keamanan dan Gender |  |
| 8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender            |  |

DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRRAW mengucapkan terima kasih atas bantuan Departemen Luar Negeri Norwegia dalam pembuatan Toolkit ini.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian mengenai praktik yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai di tingkat nasional dan internasional, membuat rekomendasi kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi internasional, dan para aktor sektor keamanan seperti polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan, dan militer.

OSCE/ODIHR

Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR) adalah lembaga utama untuk dimensi manusiawi keamanan OSCE: suatu konsep umum yang mencakup perlindungan HAM; pengembangan masyarakat yang demokratis, dengan penekanan pada pemilihan umum, pembangunan lembaga, dan tata kelola pemerintahan; penguatan pemerintahan berdasarkan hukum; dan mempromosikan rasa saling hormat yang tulus dan saling pengertian antar individu, dan juga negara. ODIHR ikut berperan dalam penyusunan Toolkit ini.

UN-INSTRRAW

Institut Penelitian dan Latihan Kemajuan Wanita Internasional PBB (UN-INSTRRAW) adalah satu-satunya lembaga PBB yang diberi tugas untuk menyusun program penelitian yang berperan bagi pemberdayaan wanita dan pencapaian kesetaraan gender di seluruh dunia. Melalui pembangunan aliansi dengan Negara-negara Anggota PBB, organisasi-organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil dan para aktor lainnya, UN-INSTRRAW:

- Melakukan penelitian berorientasi aksi dari perspektif gender yang memberikan dampak nyata terhadap berbagai kebijakan, program dan proyek;
- Menciptakan sinergi untuk manajemen pengetahuan dan pertukaran informasi;
- Memperkuat kemampuan para stakeholder (pihak yang berkepentingan) utama dalam memadukan perspektif gender ke dalam berbagai kebijakan, program dan proyek.

Gambar sampul © Keystone, AP, Herwig Vergult, 2006.

© DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRRAW, 2008.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

ISBN 978-92-9222-074-7.

Dokumen ini diterbitkan secara asli oleh DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRRAW pada tahun 2008 sebagai bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Versi bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Catherine Muir dan diterbitkan oleh IDSPS atas nama DCAF.

Kutip sebagai: Ilja Luciak, "Pengawasan Parlemeter atas Sektor Keamanan dan Gender." Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan. Penyunting Megan Bastick dan Kristin Valasek. Jenewa: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRRAW, 2008.

Dicetak oleh SRO-Kundig.

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Akronim</b>	<b>iii</b>
<b>1. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>2. Apa itu pengawasan parlementer atas sektor keamanan?</b>	<b>1</b>
<b>3. Mengapa gender penting dalam pengawasan parlementer atas sektor keamanan?</b>	<b>3</b>
3.1 Undang-undang dan kebijakan keamanan yang inklusif dan berbasis kebutuhan	3
3.2 Lembaga-lembaga sektor keamanan yang efektif dan bersifat mewakili	3
3.3 Penyusunan anggaran dan manajemen sumber daya yang adil	4
3.4 Kesetaraan gender dalam pembuatan keputusan parlemen	5
<b>4. Bagaimana memadukan gender ke dalam pengawasan parlementer atas sektor keamanan?</b>	<b>6</b>
4.1 Rumuskan undang-undang dan kebijakan keamanan yang inklusif dan berbasis kebutuhan	6
4.2 Bentuk lembaga-lembaga sektor keamanan yang bersifat mewakili dan efektif	7
4.3 Tangani kekerasan berbasis gender	8
4.4 Tingkatkan keterwakilan wanita di parlemen dan dalam pembuatan keputusan keamanan parlemen	10
4.5 Laksanakan penyusunan anggaran dan pengadaan barang yang adil	11
<b>5. Memadukan gender ke dalam pengawasan parlementer atas sektor keamanan dalam konteks khusus</b>	<b>13</b>
5.1 Negara-negara pasca-konflik	13
5.2 Negara-negara maju	16
<b>6. Rekomendasi pokok bagi anggota parlemen</b>	<b>17</b>
<b>7. Sumber daya tambahan</b>	<b>18</b>

## SINGKATAN DAN AKRONIM

<b>CEDAW</b>	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
<b>DDR</b>	Disarmament, Demobilisation, and Reintegration Processes (Proses Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi)
<b>GBV</b>	Gender-Based Violence (Kekerasan Berbasis Gender)
<b>IPU</b>	Inter-Parliamentary Union (Persatuan Antar-Parlemen)
<b>LSM</b>	Non-Governmental Organisations (Lembaga Swadaya Masyarakat)
<b>NATO</b>	North Atlantic Treaty Organization (Organisasi Perjanjian Atlantik Utara)
<b>OMS</b>	Civil Society Organisation (Organisasi Masyarakat Sipil)
<b>OSCE</b>	Organisation for Security and Cooperation in Europe (Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa)
<b>PBB</b>	United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

# Pengawasan Parleментар atas Sektor Keamanan dan Gender

## 1 Pendahuluan

Parlemen memainkan peran penting dalam reformasi sektor keamanan. Sebagai wakil kepentingan warga negara, anggota parlemen memainkan peran legislatif dan pengawasan yang sangat penting, yang meminta pertanggungjawaban lembaga eksekutif. Parlemen menyetujui anggaran, mengkaji dan melaksanakan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor keamanan, dan menjalankan fungsi pen jembatanan penting antara pemerintah dan warga negara dalam menentukan dialog nasional mengenai keamanan. Parlemen adalah satu-satunya lembaga yang dipilih secara nasional yang dapat berbicara atas nama semua warga negara dan membela kepentingan keamanan mereka. Bila anggota parlemen membahas isu gender – yang mencakup pemahaman mengenai kebutuhan keamanan pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki yang berbeda – mereka memperkuat pengawasan mereka atas sektor keamanan. Pengawasan yang tanggap terhadap gender dapat menjamin kebijakan yang inklusif dan berbasis kebutuhan; memperkuat efektivitas operasional lembaga-lembaga sektor keamanan; dan meminta mereka bertanggung jawab atas penyusunan anggaran yang adil.

Tool (alat) ini berusaha menyoroti pentingnya pengawasan parlementer atas sektor keamanan dan manfaat yang diperoleh anggota parlemen dari pemasukan perspektif gender ke dalam program kerja mereka. Kelompok sasaran utama pada tingkat nasional meliputi anggota parlemen, staf parlemen, dan partai politik. Para anggota dan staf lembaga parlemen regional, seperti Parlemen Pan Afrika, Parlemen Amerika Tengah, Parlemen Eropa serta Majelis Parlemen OSCE dan NATO juga menjadi kelompok sasaran; begitu pula lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok anggota parlemen, seperti Association of European Parliamentarians for Africa (Perhimpunan Anggota Parlemen Eropa untuk Afrika), yang melakukan kegiatan bantuan parlemen. Para pejabat reformasi sektor keamanan pemerintah dan proyek pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, peneliti dan akademisi yang meneliti saling keterkaitan antara keamanan, parlemen dan gender juga dapat memperoleh manfaat dari tool (alat) ini.

Setelah pembahasan singkat mengenai sifat dari pengawasan parlementer atas sektor keamanan, tool (alat) ini menguraikan pentingnya dan manfaat dari pemaduan gender ke dalam program kerja parlemen mengenai isu-isu gender. Tool (alat) ini memberikan saran-saran mengenai bagaimana memadukan gender ke dalam pengawasan parlementer dan

meliputi suatu bagian yang membahas gender dan pengawasan parlementer dalam konteks khusus negara-negara pasca-konflik dan negara-negara maju. Tool (alat) ini ditutup dengan beberapa rekomendasi pokok dan memberikan sejumlah sumber daya tambahan bagi para praktisi.

## 2 Apa itu pengawasan parlementer atas sektor keamanan?

*Definisi umum pengawasan parlementer atas sektor keamanan menyatakan: 'Lembaga legislatif melakukan pengawasan parlementer dengan menyetujui undang-undang yang merumuskan dan mengatur lembaga-lembaga keamanan dan kekuasaan mereka maupun apropriasi anggaran yang padan dengannya. Kontrol ini dapat juga mencakup pembentukan ombudsman parlemen atau komisi yang dapat melakukan penyelidikan mengenai pengaduan masyarakat.'*<sup>1</sup>

Tata pemerintahan yang baik memerlukan pengawasan parlementer. Parlemen berada di pusat demokrasi, yang berperan sebagai benteng melawan pemerintahan autokratis. Parlemen memiliki kekuasaan anggaran dan dengan demikian menentukan anggaran sektor keamanan. Selanjutnya, parlemen menciptakan parameter hukum untuk isu-isu keamanan. Tergantung pada negara yang bersangkutan, berikut ini adalah beberapa tindakan yang dapat diambil parlemen untuk mengawasi sektor keamanan:<sup>2</sup>

- Menyetujui, menolak atau mengusulkan perubahan atas kebijakan keamanan dan undang-undang pertahanan.
  - Mengadakan debat parlemen
  - Mengajukan pertanyaan parlemen dan melakukan interpelasi (meminta pejabat pemerintah menjelaskan suatu tindakan atau kebijakan)
  - Meminta konsultasi nasional mengenai isu keamanan
  - Meminta penelitian
- Menggunakan dan mengawasi ketentuan anggaran yang berkaitan dengan keamanan
- Mengesahkan atau mengakhiri keadaan darurat atau perang

- Menyetujui atau menolak proposal pemerintah mengenai:
  - Perjanjian, aliansi internasional, dan pengiriman pasukan ke luar negeri
  - Pengangkatan personel keamanan tingkat tinggi
  - Pembelian senjata berat
- Memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program keamanan
  - Melakukan penyelidikan atau dengar pendapat parlemen
  - Meminta evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan/program dari pemerintah atau mengangkat konsultan untuk melakukan audit kinerja khusus
  - Melakukan atau mengkaji fungsi mekanisme audit, misalnya ombudsman pertahanan

Ada berbagai aktor penting di dalam sistem parlemen:

- Anggota parlemen adalah para wakil yang dipilih oleh para pemilih anggota parlemen. Mereka dapat memastikan bahwa pengaduan warga dipertimbangkan dalam kebijakan yang berkaitan dengan keamanan yang diajukan oleh lembaga eksekutif. Mereka dapat mengadakan dengar pendapat publik, memberikan informasi penting kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan dalam beberapa kasus anggota parlemen menggunakan pertemuan di balai kota untuk membahas kebijakan pemerintah dengan konstituen mereka. Fungsi terakhir ini, yang berperan sebagai jembatan penghubung dengan masyarakat – baik pada tingkat partai atau anggota parlemen – sangat memperkuat legitimasi pembuatan keputusan parlemen mengenai isu-isu keamanan.
- Partai politik adalah unsur utama dari parlemen. Struktur organisasi kebanyakan parlemen dibangun di sekitar partai politik. Dalam kebanyakan sistem politik, partai politik, bukannya parlemen itu sendiri, adalah penghubung utama antara pembuat keputusan dan masyarakat sipil. Partai politik memiliki posisi khusus mereka sendiri di sektor keamanan dan menggunakan lembaga legislatif sebagai forum untuk menyampaikan pandangan mereka kepada masyarakat.
- Staf parlemen memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi parlemen. Staf parlemen memiliki berbagai macam keahlian yang dimanfaatkan oleh anggota parlemen dan partai politik. Staf profesional menjamin keberlanjutan dalam pembahasan isu-isu keamanan yang kompleks dan dapat memberikan konteks historis. Dengan demikian, para staf merupakan unsur penting dalam memberikan pengawasan yang efektif atas sektor keamanan.
- Ombudsman parlemen sudah sangat umum di Eropa sebagai mekanisme untuk memperkuat fungsi pengawasan parlementer. Di Eropa Barat, kecuali Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, dan Swis, semua negara memiliki ombudsman di tingkat nasional. Italia dan Swis memiliki ombudsman di tingkat daerah atau kota, sedangkan Bundestag

Jerman memiliki Komite Petisi yang ‘berperan sebagai padanan fungsional sebagaimana ombudsman militer untuk pengaduan dari angkatan bersenjata’.<sup>3</sup>

- Masyarakat sipil bisa menjadi mitra efektif dalam mendukung para anggota parlemen dalam usaha membenahi sektor keamanan. Parlemen dapat menggunakan cara yang berbeda untuk berinteraksi dengan masyarakat sipil, yang meliputi mengadakan dialog nasional, menyelenggarakan dengar pendapat publik parlemen mengenai undang-undang yang diajukan, atau meminta presentasi para pakar. Hubungan seperti ini merupakan tradisi yang telah lama berlangsung di banyak negara.

Perbedaan kemampuan pengawasan parlementer di seluruh dunia sangat jelas. Parlemen dengan sejarah kekuasaan membuat undang-undang yang kuat, legitimasi yang didasarkan pada mandat rakyat dan riwayat pengawasan yang ketat terhadap lembaga eksekutif, akan lebih efektif dalam melakukan kontrol terhadap reformasi sektor keamanan dibandingkan dengan parlemen di banyak negara berkembang dan negara yang sedang dalam masa transisi yang tidak bekerja dalam kondisi yang mendukung. Lembaga legislatif di negara-negara yang mengalami konflik dan negara-negara yang sedang dalam masa transisi menghadapi masalah politik, konstitusi, dan sumber daya yang menghambat efektivitasnya. Meskipun mengalami hambatan struktural dan institusional, parlemen memainkan peran penting dalam menjamin agar reformasi sektor keamanan menjadi suatu proses yang inklusif.

Semua parlemen terhambat oleh kompleksitas inheren dari isu-isu yang berkaitan dengan reformasi sektor keamanan dan dengan demikian menghadapi tantangan yang sama dalam usaha mereka melakukan pengawasan yang efektif. Apakah itu Kongres Amerika Serikat yang berusaha merevisi Undang-Undang PATRIOT Amerika Serikat untuk mengimbangi lembaga eksekutif yang terlalu bersemangat segera setelah kasus 11 September, parlemen Eropa yang mengkhawatirkan kebijakan pertahanan Uni Eropa atau lembaga legislatif Arab yang berusaha menunjukkan kekuasaannya segera setelah terjadinya konflik, semua lembaga legislatif sama-sama memahami kompleksitas yang dihadapi parlemen ketika mereka berusaha melakukan kontrol atas kekuatan militer dan kepolisian. Parlemen terhambat oleh kurangnya keahlian mereka maupun dominasi lembaga eksekutif di bidang keamanan. Misalnya, presiden dan kabinetnya sering menggunakan undang-undang kerahasiaan untuk menghambat akses bebas parlemen atas informasi.

Kadang-kadang, tantangan besar juga memberikan peluang besar. Misalnya, situasi konflik memberikan peluang penting kepada parlemen untuk terlibat secara efektif dalam reformasi sektor keamanan. Segera setelah berakhirnya perang saudara atau bentuk-bentuk perubahan politik yang kejam lainnya, parlemen mendapat mandat kuat untuk mewakili kepentingan warga negara dengan melaksanakan fungsi pengawasan dan legislatifnya untuk meningkatkan keamanan manusia.



### 3 Mengapa gender penting dalam pengawasan parlementer atas sektor keamanan?

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita. Karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga merujuk pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang meliputi pembuatan undang-undang, kebijakan, atau program di semua bidang dan pada semua tingkatan.<sup>4</sup>

Untuk informasi lebih lanjut lihat Tool (Alat) mengenai RSK dan Gender

#### 3.1 Undang-undang dan kebijakan yang inklusif dan berbasis kebutuhan

Parlemen yang terlibat dalam reformasi sektor keamanan mendapatkan manfaat dari pemaduan perspektif gender ke dalam fungsi inti mereka. Sebagai wakil yang dipilih konstituen mereka, anggota parlemen bertanggung jawab menjamin kebutuhan keamanan wanita, pria, anak perempuan, dan anak lelaki dimasukkan ke dalam pembuatan kebijakan keamanan. Pria, wanita, anak perempuan, dan anak lelaki menghadapi ancaman keamanan yang berbeda. Kekerasan berbasis gender (GBV) adalah salah satu dari ancaman keamanan manusia yang paling umum di dunia. Wanita dan pria memiliki akses yang berbeda atas layanan kesehatan, pendidikan, kekuasaan membuat keputusan, dan sumber daya lainnya, yang mempengaruhi setiap aspek keamanan mereka. Proses pembuatan kebijakan keamanan nasional sering berfokus pada pembahasan ancaman keamanan eksternal seperti terorisme dan senjata pemusnah massal, dan kesiapan kekuatan militer. Undang-undang dan kebijakan yang mengatur kepolisian, lembaga peradilan, lembaga masyarakat, otoritas perbatasan, intelijen, kekuatan pertahanan dan agen keamanan swasta sering dirumuskan tanpa memperhatikan bagaimana undang-undang dan kebijakan tersebut dapat menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, anggota parlemen dapat menggunakan kekuasaan legislatif, anggaran, dan kekuasaan pengawasan lainnya untuk menjamin agar undang-undang dan kebijakan keamanan memenuhi kebutuhan semua konstituen mereka, dengan mempertimbangkan GBV dan aspek-

aspek lainnya dari akses keamanan pria dan wanita yang berbeda.

Peningkatan keterlibatan wanita di sektor keamanan menimbulkan pertanyaan baru yang harus dipertimbangkan anggota parlemen, yang meliputi isu-isu pelatihan, ketentuan berpakaian, dan perumahan. Pada saat yang sama, ada kebutuhan sektor keamanan tradisional yang baru belakangan ini saja mendapat banyak perhatian, seperti pelatihan memadai personel polisi untuk menanggapi kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk GBV lainnya. Perhatian terhadap isu-isu penting ini menimbulkan keyakinan dan kepercayaan di kalangan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan di lembaga-lembaga pemerintahan. Perhatian ini juga memperkuat legitimasi parlemen.

Selanjutnya, bila parlemen mencakup berbagai aktor masyarakat sipil, yang meliputi wakil-wakil dari organisasi wanita, dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan, hal ini meningkatkan responsivitas dan legitimasi kebijakan keamanan, lembaga keamanan, dan parlemen itu sendiri (lihat Kotak 1).

#### 3.2 Lembaga sektor keamanan yang efektif dan bersifat mewakili

Parlemen dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga dan personel keamanan dengan meningkatkan pendidikan, memperkenalkan kode perilaku, menentukan mekanisme pertanggungjawaban, dan mengkaji ulang kebijakan sumber daya manusia. Pemaduan isu gender sangat penting demi efikasi dan efisiensi operasional di sektor keamanan – yang meliputi angkatan bersenjata, kepolisian, otoritas perbatasan, lembaga peradilan dan lembaga masyarakat – dan dengan demikian harus dipantau oleh parlemen. Lembaga-lembaga sektor keamanan telah terbukti lebih efektif secara operasional bila mereka meningkatkan partisipasi wanita dan menurunkan tingkat diskriminasi, pelecehan seksual dan kekerasan. Partisipasi wanita di lembaga keamanan juga menjadi aspek penting dalam menciptakan lembaga sektor keamanan yang bersifat mewakili, yang akan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Lihat Tools (Alat-alat) mengenai Reformasi Kepolisian dan Gender serta Reformasi Pertahanan dan Gender

Anggota parlemen dapat mengambil langkah-langkah pertanggungjawaban proaktif untuk meningkatkan partisipasi wanita dan menurunkan tingkat diskriminasi dan kekerasan. Misalnya, parlemen berperan menyetujui undang-undang yang menjamin semua jabatan di lembaga-lembaga sektor keamanan, termasuk jabatan tempur, terbuka bagi wanita. Pada tahun 2000, Parlemen Israel menyetujui amandemen terhadap Undang-Undang Lembaga Keamanan yang

**Kotak 1**

**Membuat kebijakan keamanan yang tanggap terhadap gender di Afrika Selatan <sup>5</sup>**

Proses reformasi sektor keamanan Afrika Selatan pasca-apartheid sering digunakan sebagai contoh inklusivitas dan partisipasi gender.

Buku Putih tahun 1996 mengenai Pertahanan Nasional Republik Afrika Selatan dirancang oleh Laurie Nathan dari Universitas Cape Town. Rancangan pertama buku tersebut ditanggapi secara luas oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan perusahaan-perusahaan industri pertahanan. Buku ini meliputi pembahasan mengenai keamanan manusia dan menekankan penciptaan budaya institusi non-seksis, yang meliputi kewajiban Kementerian Pertahanan mengidentifikasi dan menghapuskan praktik dan sikap diskriminatif di angkatan bersenjata. Selain itu, buku ini menyerukan program tindakan afirmatif dan peluang setara serta pengakuan hak wanita untuk bertugas di semua pangkat dan jabatan, termasuk peran tempur.

Buku Putih ini juga menyerukan pengkajian ulang sistem pertahanan untuk menguraikan rincian operasional seperti doktrin, rancangan kekuatan, logistik, persenjataan, sumber daya manusia dan peralatan. Berkat desakan para anggota parlemen wanita dan pihak-pihak lainnya, Komite Tetap Gabungan Parlemen bidang Pertahanan menyerukan konsultasi nasional sebagai bagian dari proses pengkajian ulang sistem pertahanan. Berbagai langkah diambil untuk menjamin partisipasi masyarakat, yang meliputi penggunaan pesawat dan bus militer untuk mengangkut para pemuka agama dan pemuka masyarakat, aktivis LSM dan wakil-wakil organisasi wanita untuk menghadiri pertemuan dan lokakarya daerah.

Organisasi-organisasi wanita tingkat akar rumput sangat penting dalam menarik perhatian terhadap isu-isu yang sebelumnya diabaikan seperti dampak lingkungan dari kegiatan militer dan pelecehan seksual terhadap wanita yang dilakukan oleh personel militer. Untuk menanggapi isu-isu ini, dua sub-komite baru dibentuk di Sekretariat Pertahanan. Setelah proses selama dua tahun, pengkajian ulang sistem pertahanan partisipatif telah membantu mewujudkan konsensus nasional mengenai isu-isu pertahanan dan menghasilkan legitimasi publik atas struktur keamanan baru tersebut.

membuka semua profesi militer bagi wanita.<sup>6</sup> Bila parlemen melakukan kontrol terhadap komposisi dan mandat misi pemeliharaan perdamaian, mereka berpeluang menyerukan peningkatan partisipasi wanita.

Terjadi peningkatan kesadaran bahwa misi ini lebih efektif bila para anggotanya telah mendapatkan pelatihan gender dan pasukan itu sendiri melibatkan wanita dalam struktur komando dan juga dalam pasukan yang sesungguhnya. Prajurit wanita cenderung lebih memahami kebutuhan bergender penduduk yang mereka layani dan lebih mungkin didekati oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan.<sup>7</sup>

Parlemen juga memainkan peran penting dalam mencegah dan meminta pertanggung-jawaban lembaga sektor keamanan atas terjadinya diskriminasi, pelecehan seksual dan kekerasan. Dari skandal personel pemelihara perdamaian yang terlibat dalam eksploitasi seksual dan perdagangan manusia, tingkat pelecehan seksual yang tinggi terhadap wanita dalam angkatan bersenjata, sampai penganiayaan seksual

oleh staf penjara, bentuk-bentuk GBV ini adalah tindak pidana yang mengurangi efektivitas lembaga keamanan. Sebagai respons, anggota parlemen dapat menyetujui kebijakan yang menetapkan kode perilaku, membuat undang-undang mengenai tindakan hukuman, menetapkan ombudsman pertahanan dan/atau gender, menyerukan penyelidikan mendalam dan memantau pelaksanaan sanksi.

Salah satu contohnya adalah resolusi Parlemen Eropa mengenai partisipasi wanita dalam penyelesaian konflik secara damai, yang disetujui pada tahun 2000. Resolusi ini meminta negara-negara anggota untuk melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan partisipasi wanita dan responsivitas gender dalam konteks prakarsa yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan. Selain meminta pelatihan gender bagi personel dan staf militer yang terlibat dalam penyusunan kebijakan mengenai konflik, resolusi ini menyerukan perekrutan dan pencalonan lebih banyak wanita di lembaga-lembaga diplomatik dan mempromosikan penggunaan tim pemelihara perdamaian, tim pencari fakta dan tim bantuan yang semua anggotanya wanita. Sehubungan dengan pelanggaran HAM,

**Kotak 2**

**Kontribusi anggota parlemen wanita Rwanda terhadap rekonstruksi pasca-konflik**

Setelah genosida Rwanda, pembenahan pemilihan umum yang menentukan kuota legislatif membantu membuat Rwanda menjadi pemimpin dunia dalam hal keterwakilan wanita di parlemen, di mana 48,8 per sen dari anggota parlemen adalah wanita. Pengalaman Rwanda memperlihatkan perbedaan yang dapat diwujudkan para anggota parlemen wanita dalam rekonstruksi pasca-konflik. Anggota parlemen wanita membentuk kaukus parlemen pertama yang melintasi garis partai dan mencakup suku Hutu dan Tutsi. Kaukus ini membahas isu-isu keamanan wanita, tanpa memperhatikan etnis atau afiliasi partai mereka, dengan memprakarsai undang-undang mengenai hak wanita untuk mewarisi harta dan hak janda untuk menuntut bagian harta dari keluarga pria suaminya yang sudah meninggal, dan undang-undang mengenai GBV.<sup>9</sup> Pemerintah membentuk sebuah departemen yang ditujukan untuk pemberdayaan wanita dan kebijakan gender nasional dibuat pada tahun 2001. Hal ini memberikan peluang bagi gender untuk

dijadikan salah satu dari tiga prioritas utama dalam proses pengkajian ulang strategi penurunan kemiskinan. Pemerintah mensponsori penelitian ekstensif mengenai berbagai aspek dari kekurangan yang berkaitan dengan gender. Temuan penelitian tersebut dimasukkan dalam pembahasan di setiap departemen dan lembaga Pemerintah mengenai hambatan-hambatan terhadap pencapaian kesetaraan gender dan bagaimana mengatasinya. Karena itu, Departemen Pertanian bertekad meningkatkan jumlah wanita yang dijangkau dengan program penyuluhannya; Departemen Pendidikan berusaha meningkatkan retensi anak perempuan di sekolah-sekolah; lembaga-lembaga pemerintah daerah bertekad meningkatkan keterwakilan wanita dalam proses pembuatan keputusan daerah; dan langkah-langkah penyusunan anggaran gender dilakukan untuk melatih para pegawai negeri sipil untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata melalui alokasi sumber daya.<sup>10</sup>

resolusi ini mengutuk pelanggaran seksual prajurit yang terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian; menyerukan tindakan terhadap perdagangan manusia; dan merekomendasikan agar pengamat HAM menyertai personel pemelihara perdamaian untuk menjamin penegakan hukum internasional.

### 3.3 Penyusunan anggaran dan manajemen sumber daya yang adil

Parlemen menyetujui dan mengawasi anggaran yang berkaitan dengan keamanan. Pengawasan anggaran merupakan salah satu cara paling penting bagaimana parlemen dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>11</sup> Komite-komite parlemen juga memainkan peran penting dalam pengadaan senjata dan peralatan militer. Analisis anggaran militer dan kepolisian melalui lensa gender – yang dinamakan penyusunan anggaran gender – dapat menjadi alat penting untuk membantu parlemen mengidentifikasi kebutuhan keamanan wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan yang berbeda dan memastikan agar kebutuhan tersebut cukup diprioritaskan dan diberikan sumber daya. Analisis ini juga dapat menyoroti apakah cukup dana yang earmarked (disediakan) untuk prakarsa gender, seperti pemberian pelatihan gender bagi personel sektor keamanan.

Penyusunan anggaran gender masih menjadi tantangan karena pembuatan keputusan ekonomi itu sendiri jauh dari seimbang gender. Sebagaimana dalam kasus jabatan penting di sektor keamanan, wanita sangat kurang terwakili dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pada tahun 2005, hanya dua puluh wanita di seluruh dunia yang memegang jabatan menteri di bidang keuangan dan anggaran.<sup>12</sup> Namun demikian, lebih lima puluh negara telah menerima prakarsa penyusunan anggaran gender, di mana sekitar setengah di antaranya telah melaksanakan program ini.<sup>13</sup> Di antara negara-negara anggota Dewan Eropa, negara-negara Nordik, Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Inggris, Irlandia, Polandia, Spanyol, Swis dan Turki semuanya telah melaksanakan prakarsa penyusunan anggaran gender.<sup>14</sup>

### 3.4 Kesetaraan gender dalam pembuatan keputusan parlemen

Untuk memperkuat legitimasi dan representativitas pengawasan parlemerter atas sektor keamanan diperlukan peningkatan jumlah anggota parlemen wanita. Meskipun telah terjadi peningkatan keterwakilan wanita belakangan ini, keseimbangan gender formal dalam pembuatan keputusan politik masih merupakan tujuan yang belum tercapai. Secara signifikan, persentase anggota parlemen dengan keterwakilan wanita kurang dari 10% telah turun dari 63% pada tahun 1995 menjadi sekitar 30% pada tahun 2007.<sup>15</sup> Pada saat yang sama, masih ada tujuh

negara (di antara negara-negara yang memberikan data kepada Inter-Parliamentary Union [IPU] (Persatuan Antar-Parlemen) yang belum memiliki satu pun wanita di parlemen.

Pada tahun 2007, kurang dari 20% dari anggota parlemen dunia adalah wanita (lihat Tabel 1).

Hanya negara-negara Nordik yang memiliki parlemen dengan komposisi gender yang selalu mendekati keseimbangan gender. Belakangan ini Rwanda sudah masuk ke dalam kelompok elit ini dan telah memilih parlemen yang memiliki keterwakilan pria dan wanita yang setara (lihat Kotak 2). Walaupun kemajuan besar telah terjadi sejak tahun 1995, ketika proporsi wanita di parlemen hanya sedikit di atas 11%, kesenjangan gender masih signifikan.

Kurangnya keseimbangan gender di lembaga-lembaga pembuat keputusan legislatif dan eksekutif dunia merupakan hambatan struktural dalam usaha membuat proses pembuatan keputusan keamanan dan pertahanan parlemen lebih bersifat mewakili. Umumnya, wanita hanya memegang sebagian kecil jabatan menteri di seluruh dunia, ketidakseimbangan yang sangat jelas di bidang pertahanan dan peradilan. Pada tahun 2005, dari 183 negara yang diteliti, hanya 12 wanita memimpin departemen urusan pertahanan dan veteran dan hanya terdapat 29 menteri kehakiman wanita. Dari 97 parlemen yang melaporkan data mengenai komposisi gender komite parlemen mereka pada tahun 1997, hanya 3% yang memiliki wanita yang memimpin komite pertahanan. Secara keseluruhan, kurang dari 20% dari pejabat pemimpin semua komite parlemen adalah wanita.<sup>17</sup> Dengan demikian, salah satu tantangan yang dihadapi adalah memasukkan lebih banyak anggota parlemen wanita ke dalam komite keamanan dan mengangkat para wanita untuk jabatan-jabatan keamanan penting di lembaga pertahanan, kepolisian dan peradilan.

Tabel 1   Komposisi gender parlemen dunia tahun 2007 (majelis tunggal atau rendah) <sup>16</sup>		
Kawasan	% Anggota Parlemen Wanita	% Anggota Parlemen Pria
Negara-negara Nordik	41,6	58,4
OSCE Eropa (termasuk negara-negara Nordik)	20,4	79,6
Negara-negara Amerika	20,0	80,0
OSCE Eropa (tidak termasuk negara-negara Nordik)	18,4	81,6
Afrika Sub-Sahara	17,2	82,8
Asia	16,6	83,4
Pasifik	13,1	86,9
Negara-negara Arab	9,6	90,4
<b>Rata-rata dunia</b>	<b>19,6</b>	<b>80,4</b>

Partisipasi wanita dan pria yang lebih setara dalam proses pengawasan yang demokratis memperkuat legitimasi pembuatan keputusan parlemen. Karena itu, parlemen itu sendiri dapat memperoleh manfaat dari pembahasan hubungan kekuasaan yang tidak setara di dalam masyarakat dan perwujudan kesetaraan formal dan legal antara wanita dan pria.

*'Sebagai anggota parlemen, wanita dapat memainkan peran penting dalam menuntut pertanggungjawaban dan transparansi dari lembaga keamanan; menentukan anggaran dan kebijakan untuk memastikan pengeluaran militer tidak menjauhkan sumber daya dari isu-isu pembangunan seperti pendidikan, lingkungan, layanan sosial dan layanan kesehatan; melibatkan masyarakat dalam debat dan dialog mengenai isu-isu ini; dan memastikan keterwakilan yang demokratis di dalam struktur keamanan baru. Di Afrika Selatan, anggota parlemen wanita mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pembenahan dengan memasukkan LSM saat merumuskan kebijakan baru. Mereka juga menyampaikan pendapat, dengan meminta kejujuran dan transparansi bila suatu kesepakatan pengadaan senjata dicapai tanpa debat publik dan tuduhan korupsi semakin banyak. Wanita juga mengkritik pemerintah atas pembelanjaan dana yang terbatas untuk membeli senjata ketimbang mengurangi kemiskinan, dan salah satu anggota penting parlemen wanita mengundurkan diri sebagai protes atas kesepakatan tersebut.'*<sup>18</sup>

Sebagai kesimpulan, memadukan gender ke dalam pengawasan parlementer atas sektor keamanan sangat penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya, terdapat hubungan antara kesetaraan gender dan tingkat konflik bersenjata intra-negara yang lebih rendah. Mempertimbangkan aspek-aspek gender dengan sungguh-sungguh saat membenahi sektor keamanan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik di masa depan. Kesetaraan gender dalam pembuatan keputusan, termasuk dalam sektor keamanan, menguntungkan bagi semua anggota masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan, 'semakin tinggi tingkat keterwakilan wanita di parlemen, akan semakin rendah tingkat konflik bersenjata intra-negara'.<sup>19</sup>

**Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan instrumen hukum internasional**

Memadukan gender ke dalam pengawasan parlementer atas sektor keamanan diperlukan juga untuk mematuhi undang-undang, instrumen hukum dan norma internasional dan regional mengenai keamanan dan gender. Instrumen hukum utama meliputi:

- Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (1979)
- Deklarasi dan Pijakan Aksi Beijing (1995)
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang Undang-undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional.

## 4 Bagaimana memasukkan gender ke dalam pengawasan parlementer atas sektor keamanan?

Semua negara, apakah mereka telah lama menikmati masa kedamaian dan pemerintahan yang demokratis atau baru saja terlepas dari konflik yang kejam, harus menghadapi isu-isu yang kompleks dan sulit mengenai sektor keamanan. Pada saat yang sama, tantangan dan peluang khusus yang melibatkan pengawasan parlementer atas sektor keamanan berbeda antar-negara. Dengan demikian, segala strategi harus disesuaikan dengan konteks khusus pembenahannya. Misalnya, di banyak negara maju, isu pelibatan wanita secara lebih penuh ke dalam kekuatan militer dan kepolisian, dan juga peluang gaji atau promosi yang setara sering lebih diutamakan, sementara di negara-negara pasca-konflik pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana melindungi wanita dan anak perempuan dari GBV, yang diperparah oleh perang, mungkin lebih mendominasi agenda kerja. Bagian ini menyajikan beberapa strategi praktis sedangkan konteks khusus dijelaskan pada Bagian 5.

### 4.1 Rumuskan undang-undang dan kebijakan keamanan yang inklusif dan berbasis kebutuhan

Parlemen berperan mewakili berbagai kepentingan masyarakat dan menggunakan 'kemampuannya untuk membangun hubungan di dalam parlemen dan di dalam masyarakat yang lebih luas'.<sup>20</sup> Pada tahap ini, parlemen 'sering kurang melibatkan aktor non-pemerintah'.<sup>21</sup> Parlemen, khususnya di negara-negara yang mengalami konflik, cenderung memiliki hubungan yang lemah dengan konstituen mereka. Banyak anggota parlemen berusaha menjalin hubungan dengan pemilih mereka hanya selama masa kampanye pemilihan umum. Untuk memperkuat legitimasi mereka, parlemen harus menjangkau konstituen mereka, 'dengan meningkatkan hubungan antara parlemen dan mitra pemerintah lainnya seperti masyarakat sipil'.<sup>22</sup>

Dalam konteks negara yang mengalami peperangan dan negara yang sedang dalam masa transisi, masyarakat sipil mulai memainkan peran yang lebih aktif. Beberapa parlemen Afrika, termasuk parlemen Liberia, Somalia dan Zimbabwe, sudah semakin dekat dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Begitu pula, di Amerika Tengah kami menemukan hubungan serupa antara parlemen dan LSM. Namun demikian, prakarsa dialog seperti ini jarang berasal dari parlemen.<sup>23</sup>

Dari perspektif gender, organisasi-organisasi wanita merupakan mitra utama dalam usaha parlemen

memperkuat kesetaraan gender. Kebijakan yang tanggap terhadap gender yang disetujui parlemen sering berasal dari proposal yang diajukan masyarakat sipil, yang pada gilirannya, berkepentingan mendukung pelaksanaannya. Misalnya, kelompok-kelompok wanita di banyak negara terlibat secara aktif dalam kampanye menentang GBV. Karena itu, parlemen yang telah memperkuat undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga mereka dapat mengandalkan dukungan kelompok-kelompok wanita dalam pelaksanaan undang-undang ini.

Parlemen memainkan peran penting dalam mencapai keamanan yang inklusif dengan menyetujui undang-undang dan kebijakan yang tanggap terhadap gender. Strategi praktis yang dapat diterapkan meliputi:

#### Proses partisipatif

- Siapkan mekanisme untuk debat dan konsultasi publik, seperti dengar pendapat publik, untuk melibatkan masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan mengenai isu pertahanan, perpolisian, manajemen perbatasan, peradilan dan hukuman pidana.
- Dorong organisasi-organisasi wanita untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi kebijakan.
- Setiap anggota parlemen dapat menyediakan waktu luang untuk mendengarkan pengaduan yang disampaikan organisasi-organisasi wanita perkotaan dan pedesaan.

#### Undang-undang dan kebijakan keamanan yang tanggap terhadap gender

- Masukkan materi yang berkaitan dengan gender dalam undang-undang dan kebijakan keamanan, seperti penanganan GBV dan promosi partisipasi penuh dan setara pria dan wanita di lembaga-lembaga sektor keamanan.
- Gunakan bahasa yang inklusif gender ('personel polisi') dan spesifik gender ('personel militer pria dan wanita') sesuai keperluan.
- Minta pendapat pakar gender dalam merancang dan mengkaji ulang kebijakan keamanan.
- Lakukan penilaian dampak gender dari kebijakan keamanan yang diajukan dan yang sudah diterapkan.

#### Pelatihan gender dan mandat bagi pembuat kebijakan keamanan

- Pastikan para anggota parlemen dan staf mereka, terutama mereka yang menjadi anggota komite pertahanan dan keamanan, mendapat pelatihan mengenai isu gender dan keamanan.
- Pastikan komite pertahanan dan keamanan memasukkan isu gender dalam mandat mereka.

Lihat Tool (Alat) mengenai Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender

## 4.2 Bentuk lembaga-lembaga sektor keamanan yang bersifat mewakili dan efektif

Lembaga keamanan yang efektif adalah lembaga yang bersifat mewakili dan memahami kebutuhan keamanan bergender masyarakat yang mereka layani. Efikasi dan efektivitas operasional dapat diperkuat bila gender dipertimbangkan, terutama melalui usaha untuk meningkatkan keterwakilan wanita dan melaksanakan pelatihan gender.

Wanita cenderung menjadi kelompok minoritas yang terpinggirkan di lembaga-lembaga sektor keamanan, yang meliputi kepolisian, kekuatan militer, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan otoritas perbatasan. Misalnya, personel wanita hanya empat per sen dari keseluruhan personel Kepolisian Negara Rwanda.<sup>24</sup> Parlemen dapat meminta kuota dan langkah-langkah diskriminasi positif lainnya untuk mengubah komposisi aparat keamanan. Misalnya, sebelum perang tidak ada personel polisi wanita di Kosovo.<sup>25</sup> Kuota berhasil didapatkan, dan sekarang para wanita merupakan 14% dari keseluruhan personel kepolisian negara yang di bawah pengawasan PBB ini, yang tercapai berkat pemberlakuan kuota wajib.<sup>26</sup> Dengan sistem baru ini, 20% dari semua personel baru harus wanita.<sup>27</sup> Liberia telah menerapkan kuota 20% untuk pelibatan wanita dalam kepolisian dan angkatan bersenjata. Pada tahun 2004, hanya ada 11 hakim wanita dibandingkan dengan 32 hakim pria di Pengadilan HAM Eropa. Majelis Parlemen Eropa menyetujui resolusi yang menyatakan bahwa majelis tersebut tidak lagi akan mempertimbangkan daftar calon yang tidak mencakup setidaknya satu kandidat dari setiap jenis kelamin. Peraturan ini diubah setahun kemudian untuk memungkinkan daftar kandidat satu jenis kelamin, asalkan daftar tersebut berasal dari jenis kelamin yang kurang terwakili di Pengadilan tersebut (saat ini wanita).

Selain memusatkan perhatian pada peningkatan perekrutan wanita, prakarsa lainnya diperlukan untuk menciptakan budaya institusi non-diskriminatif yang dapat membantu menjamin retensi dan kemajuan wanita. Salah satu prakarsa penting di bidang ini adalah pelatihan gender. Parlemen menyetujui anggaran untuk program pelatihan sektor keamanan dan dapat menggunakan fungsi pengawasan mereka untuk meminta pemasukan pelatihan gender khusus dan juga pengarusutamaan isu gender ke dalam kurikulum inti pelatihan. Misalnya, selama perundingan perdamaian para pemimpin wanita di Burundi menyatakan bahwa pasukan keamanan harus mengadakan 'pelatihan teknis, moral, dan kewarga-negeraan . . . dengan penekanan khusus pada perlindungan wanita dan anak-anak'.<sup>28</sup>

Strategi praktis yang dapat diterapkan meliputi:

#### Pelatihan gender untuk personel sektor keamanan

- Pastikan semua personel sektor keamanan mendapat pelatihan mengenai sensitivitas gender.

Lihat Tool (Alat) mengenai Pelatihan Gender untuk Personel Sektor Keamanan

### Prakarsa untuk meningkatkan perekrutan, retensi, dan kemajuan wanita

- Pantau pelaksanaan komitmen internasional, regional, dan nasional sehubungan dengan partisipasi penuh dan setara wanita.
- Pastikan bahwa undang-undang yang mengatur partisipasi di lembaga-lembaga sektor keamanan mempromosikan partisipasi wanita dan kelompok lainnya yang kurang terwakili dan terpinggirkan.
- Lakukan pengawasan terhadap kebijakan sumber daya manusia dan perekrutan, pelatihan dan manajemen lembaga-lembaga sektor keamanan. Ini merupakan unsur penting untuk menjamin agar lembaga-lembaga sektor keamanan mempromosikan partisipasi penuh dan setara wanita dan pria, bekerja secara efektif, tidak diskriminatif, dan menangani ketidakamanan berbasis gender.
- Minta target wajib untuk meningkatkan keterwakilan wanita di lembaga-lembaga sektor keamanan.

## 4.3 Tangani kekerasan berbasis gender

Para anggota parlemen yang terlibat dalam reformasi sektor keamanan harus memberikan perhatian khusus terhadap GBV, dan juga terhadap undang-undang mengenai kepemilikan tanah, warisan, perkawinan, dan orientasi seksual.

Lihat bagian Reformasi Hukum pada Tool (Alat) mengenai Reformasi Peradilan dan Gender

Caroline Moser menekankan bahwa 'wanita dan pria sebagai aktor sosial masing-masing mengalami kekerasan dan konflik dengan cara yang berbeda, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.'<sup>29</sup> Pasukan keamanan yang bersifat mewakili lebih mungkin menyadari dan peka terhadap dampak GBV, baik yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di Eropa Barat dan Amerika Serikat atau pun akibat dari pemerkosaan pada masa perang di Afrika atau kawasan Balkan.

Parlemen dapat menangani GBV dengan memastikan agar undang-undang yang ada membahas pelanggaran ini dan dengan menyetujui undang-undang baru yang mencakup segala bentuk GBV dan menetapkan sanksi yang setimpal kepada pelakunya. Ketika membangun kembali sistem peradilan pasca-konflik, para anggota parlemen dapat memastikan agar GBV dimasukkan dalam mandat komisi kebenaran dan

pengadilan khusus yang dibentuk tidak lama setelah perang berakhir. Selanjutnya, parlemen dapat berperan sebagai forum untuk meningkatkan kesadaran sosial mengenai dampak kekerasan bergender.

Bouta, Frerks, dan Bannon menekankan bahwa 'kebijakan GBV harus menargetkan pria maupun wanita' untuk 'menjangkau semua aktor yang terlibat (para penyintas dan keluarganya, saksi dan pelaku)'.<sup>30</sup> Walaupun diakui bahwa pria juga mengalami GBV, kebijakan yang sudah diterapkan tidak mempertimbangkan kebutuhan korban pria.<sup>31</sup> Karena itu, untuk mendukung keamanan yang inklusif, para anggota parlemen harus mengarahkan perhatian pada penyintas kekerasan seksual wanita maupun pria.

Personel polisi baru perlu mendapat pelatihan agar lebih efektif dalam memberikan respons terhadap kejahatan berbasis gender. Dengan menyadari kenyataan ini, program pelatihan khusus telah dilaksanakan di berbagai negara di seluruh dunia. Misalnya, pada tahun 2002, sepertiga dari kepolisian Rwanda mendapat pelatihan untuk memperkuat respons mereka terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual dan kejahatan berbasis gender.<sup>32</sup> Mekanisme juga perlu ditetapkan untuk mencegah agar personel sektor keamanan tidak melakukan GBV dan untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan.

Strategi praktis yang dapat diterapkan meliputi:

### Setujui undang-undang yang komprehensif untuk mencegah dan menghukum GBV

- Pastikan segala bentuk kekerasan berbasis gender, yang meliputi pemerkosaan dalam perkawinan, pemerkosaan pria terhadap pria, kehamilan paksa dan aborsi, serta 'pembunuhan demi kehormatan' adalah kejahatan, dengan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan.
- Pastikan rumusan hukum mengenai pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya bersifat netral gender dan kejahatan seksual diperlakukan sama baik yang terjadi dengan atau tanpa hubungan perasaan.
- Pantau pelaksanaan komitmen internasional, regional dan nasional berkaitan dengan penghapusan GBV.

### Minta pertanggungjawaban lembaga dan personel keamanan atas pencegahan dan respons terhadap kekerasan berbasis gender

- Pastikan terdapat undang-undang dan kode perilaku yang jelas mengenai tanggung jawab personel sektor keamanan atas pelanggaran HAM, termasuk prosedur penjatuhan hukumannya.
- Pantau pengaduan, penyelidikan dan hukuman atas pelanggaran HAM yang dilakukan personel sektor keamanan, dengan tujuan mengakhiri kekebalan hukum atas GBV.
- Lakukan penyelidikan/penelitian mengenai sifat dan tingkat kejadian GBV dan diskriminasi di lembaga-lembaga sektor keamanan.

**Tabel 2** Transformasi parlemen: negara-negara yang mencapai keterwakilan wanita 30% pada tahun 2007<sup>34</sup>

Negara	Sistem pemilihan umum	Keberadaan kuota <sup>(1)</sup>		% Wanita di Majelis Nasional <sup>(2)</sup>
Rwanda	Pluralitas: yang mendapat suara terbanyak jadi pemenang	YA	Tipe 1: Konstitusi menetapkan kuota untuk wanita. Tipe 2: 24 kursi dari 80 kursi yang ada disediakan untuk wanita di Majelis Nasional. Tipe 3: 20% anggota dewan daerah disediakan untuk wanita	48,8 (2005)
Swedia	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 4: kuota 50% untuk wanita di Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Kiri dan Partai Hijau	47,3 (2006)
Finlandia	Perwakilan proporsional: sistem daftar	TIDAK		42,0 (2007)
Kosta Rika	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 2: kuota 40% untuk wanita dalam semua pemilihan umum Tipe 4: kuota 40% untuk wanita di Partai Pembebasan Nasional dan Partai Persatuan Kristen-Sosial 50% di Partai Aksi Rakyat	38,6 (2006)
Norwegia	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 4: kuota 40% untuk wanita di Partai Kiri Sosialis, Partai Buruh Norwegia, Partai Tengah, dan Partai Rakyat Kristen	37,7 (2005)
Denmark	Perwakilan proporsional: sistem daftar	TIDAK	Dulu menerapkan kuota Tipe 4 Sistem kuota tidak lagi diterapkan sekitar tahun 1996.	36,9 (2005)
Belgia	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 2: Kuota minimum sepertiga untuk setiap jenis kelamin dua posisi puncak di daftar calon anggota legislatif partai tidak boleh dipegang oleh anggota dari jenis kelamin yang sama. Tipe 4: kuota 50% untuk wanita di Partai Sosialis Flemish dan Partai Sosialis Perancis	36,7 (2007)
Belanda	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 4: Partai Buruh menyediakan kuota 50% untuk wanita Partai Kiri Hijau juga menyediakan kuota untuk wanita (% tidak disebutkan).	36,7 (2005)
Kuba	Suara mayoritas: sistem dua putaran	TIDAK		36,0 (2005)
Spanyol	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 4: Partai Pekerja Sosialis Spanyol menyediakan kuota 40% untuk setiap jenis kelamin.	36,0 (2005)
Argentina	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 1: Konstitusi menetapkan kuota untuk wanita. Tipe 2: 30% daftar calon anggota legislatif partai harus memasukkan wanita di nomor jadi. Tipe 3: Undang-undang nasional dan peraturan daerah menetapkan kuota. Tipe 4: Sebagian besar partai menerapkan kuota 30% untuk wanita.	35,0 (2005)
Mozambik	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 4: Partai Front Pembebasan Mozambik menyediakan kuota 30% untuk wanita.	34,8 (2005)
Afrika Selatan	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 4: Partai Kongres Nasional Afrika menyediakan kuota 30% untuk wanita, kuota 50% untuk wanita pada daftar calon anggota legislatif partai di tingkat daerah.	32,8 (2005)
Austria	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 4: Partai Alternatif Hijau menyediakan kuota 50% untuk wanita, Partai Rakyat Austria menyediakan kuota 33,3% dan Partai Sosial Demokrat Austria menyediakan kuota 40%.	32,2 (2006)
Selandia Baru	Sistem proporsional anggota campuran	YA	Tipe 4: Kuota partai sukarela	32,2 (2005)
Islandia	Perwakilan proporsional: sistem daftar	YA	Tipe 4: Partai Aliansi Rakyat dan Partai Sosial Demokrat menyediakan kuota 40% untuk wanita.	31,7 (2007)
Jerman	Perwakilan proporsional: sistem anggota campuran	YA	Tipe 4: Partai Sosialis Demokrat dan Partai Hijau menyediakan kuota 50% Partai Uni Demokrat Kristen menyediakan kuota 33,3% Partai Sosial Demokrat Jerman menyediakan kuota 40%.	31,6 (2005)

Burundi	Perwakilan proporsional	YA	Tipe 4: Undang-undang menetapkan kuota 30% untuk calon anggota legislatif wanita.	30,5 (2005)
<p>Catatan 1: Tipe-tipe kuota berikut dipertimbangkan:</p> <p>Tipe 1 = Kuota konstitusi untuk parlemen nasional</p> <p>Tipe 2 = Kuota undang-undang atau peraturan pemilihan umum untuk parlemen nasional</p> <p>Tipe 3 = Kuota konstitusi atau legislatif untuk pemerintah daerah</p> <p>Tipe 4 = Kuota partai politik untuk calon peserta pemilihan umum</p> <p>Catatan 2: Tahun pemilihan umum terakhir di dalam tanda kurung</p>				

### Ombudsman

- Pertimbangkan penetapan jabatan, seperti jabatan ombudsman, dengan kekuasaan khusus untuk mengawasi pemaduan isu gender di lembaga-lembaga pertahanan dan lembaga-lembaga sektor keamanan lainnya, dan/atau pastikan agar jabatan pengawas seperti ini menangani isu-isu gender. Jabatan ombudsman parlemen dijadikan lembaga di banyak negara. Misalnya, di Jerman seorang ombudsman khusus menangani isu-isu angkatan bersenjata. Para ombudsman bisa menjadi pendukung efektif dan memainkan peran penting dalam menyoroti dampak kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan yang berkaitan dengan konflik.

## 4.4 Tingkatkan keterwakilan wanita di parlemen dan dalam pembuatan keputusan keamanan parlemen

Parlemen dapat mengambil berbagai jenis tindakan untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen wanita dan juga meningkatkan partisipasi mereka dalam komite yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Misalnya, anggota parlemen dapat membuat undang-undang pembenahan pemilihan umum untuk menjamin keterlibatan penuh wanita dan kelompok minoritas dalam proses politik. Pertimbangan penting bagi parlemen melibatkan jenis sistem pemilihan umum yang akan digunakan dan penerapan kuota pemilihan umum dan partai.

Kuota elektoral memainkan peran penting dalam mengubah komposisi gender parlemen dunia. Sekitar empat puluh negara telah memiliki kuota gender konstitusional atau elektoral untuk pemilihan umum parlemen.<sup>33</sup> Sebagaimana yang sering dikemukakan, keterwakilan wanita di parlemen perlu mencapai suatu ‘massa kritis’ – yang diperkirakan sebesar 30%. ‘Argumen massa kritis’ menyatakan bahwa agar wanita memberikan pengaruh signifikan terhadap pembuatan keputusan parlemen, mereka harus hadir dalam jumlah yang signifikan. Pada bulan Agustus 2007, delapan belas negara telah mencapai atau melebihi 30% keterwakilan wanita di parlemen (lihat Tabel 2).

Komite parlemen memberikan kesempatan kepada para anggota parlemen untuk menyusun program kerja mereka dan memusatkan perhatian pada keahlian. Para anggota parlemen dapat menggunakan

komite pertahanan dan keamanan untuk melaksanakan fungsi pengawasan mereka dengan meminta para anggota lembaga keamanan untuk memberikan kesaksian mengenai efisiensi operasional dari pasukan keamanan, atau dengan meminta masukan pakar dari para pakar luar mengenai masalah keamanan. Partisipasi anggota parlemen wanita di komite ini merupakan aspek penting dari partisipasi penuh wanita dalam pembuatan keputusan sektor keamanan.

Berbagai prakarsa dapat diambil untuk memastikan agar komite parlemen seimbang gender, termasuk prakarsa penetapan kuota. Misalnya, pada tahun 2005 Knesset, parlemen Israel, menyetujui amandemen atas undang-undang Keterwakilan Setara Wanita tahun 1956 yang memerintahkan pelibatan wanita dalam tim-tim yang dibentuk untuk pelaksanaan perundingan kebijakan dan perdamaian dalam negeri, luar negeri, atau keamanan. Dua anggota parlemen memprakarsai undang-undang tersebut bekerja sama dengan Isha L'Isha, sebuah organisasi wanita tingkat akar rumput. Supaya undang-undang tersebut disetujui, sebuah koalisi ad hoc organisasi wanita dan organisasi perdamaian dibentuk dan lobi serta kampanye media yang ekstensif dilakukan.<sup>35</sup>

Strategi berikut dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi wanita (dan kelompok masyarakat yang kurang terwakili lainnya) di parlemen dan di komite keamanan dan pertahanan:

### Tingkatkan partisipasi wanita di parlemen

- Tentukan kuota, apakah dalam Konstitusi, undang-undang partai politik atau peraturan pemilihan umum, yang menyediakan kursi di parlemen untuk wanita.
- Adakan kerja sama dengan masyarakat sipil untuk melaksanakan program, pada tingkat parlemen dan juga partai politik, untuk mendorong dan membekali wanita agar mau mencalonkan diri untuk suatu jabatan (lihat Kotak 3).
- Berikan insentif kepada partai-partai politik agar mencalonkan wanita untuk suatu jabatan.
- Bentuk kaukus parlemen wanita, sehingga para anggota parlemen wanita dapat saling mendukung dan bekerja sama sehubungan dengan berbagai kebijakan untuk mempromosikan isu-isu gender; dan/atau bentuk kaukus parlemen wanita yang ditujukan untuk mengemukakan isu-isu gender (lihat Kotak 5).



## Kotak 3

## LSM Kamboja: mempromosikan partisipasi wanita dan kerja sama lintas-partai

Tidak adanya kerja sama lintas-partai di Kamboja dan dominasi satu partai telah menimbulkan dampak negatif terhadap aliansi wanita di berbagai partai dengan tujuan mempromosikan isu-isu gender, terutama pada tingkat nasional. Meskipun demikian, melalui berbagai LSM, wanita Kamboja memelopori pembangunan jembatan penghubung antar-garis partai. Wanita untuk Kesejahteraan (WfP – Women for Prosperity) merupakan salah satu dari organisasi yang paling efektif di bidang ini. Dipimpin oleh tokoh wanita yang baru kembali dari pengasingan, Pok Nanda, WfP telah merintis program-program yang tidak hanya mendorong dan membantu wanita memasuki dunia politik, tapi juga menjembatani perbedaan lintas-partai pada tingkat komune. Di antara jaringannya adalah para anggota dewan wanita dari semua kelompok, termasuk tiga partai politik utama. WfP memusatkan perhatian pada tantangan bersama yang dihadapi wanita di bidang politik tanpa memperhatikan ideologi dan memberikan pelatihan berkelanjutan sehingga dapat membangun keterampilan mereka sepanjang waktu. Dalam persiapan menghadapi pemilihan umum dewan komune, WfP mendukung 5.527 calon, dengan memberikan bantuan untuk pidato di depan umum, membantu penulisan naskah pidato, menjawab pertanyaan dari pemilih dan mengatasi tantangan dari para anggota partai pria yang tidak bersimpati dengan partisipasi wanita. WfP telah menciptakan landasan politik baru untuk partisipasi wanita dan juga memberikan model yang efektif untuk kerja sama lintas-partai.<sup>36</sup>

- Lakukan audit implikasi gender dari sistem pemilihan umum.
- Para anggota parlemen wanita yang berpengalaman dapat membimbing anggota parlemen wanita yang belum berpengalaman atau wanita yang ingin menjadi anggota parlemen.

#### Tingkatkan partisipasi wanita dalam komite keamanan dan pertahanan parlemen dan dalam pembuatan keputusan keamanan

- Setujui undang-undang yang mengharuskan peningkatan partisipasi wanita dalam komite yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.
- Pertimbangkan penetapan kuota gender untuk semua struktur komite.
- Minta lebih banyak wanita pada berbagai jabatan eksekutif tingkat tinggi, yaitu di kabinet dan di dewan keamanan nasional.

### 4.5 Laksanakan penyusunan anggaran dan pengadaan barang yang adil

Anggota parlemen dapat melaksanakan prakarsa penyusunan anggaran gender untuk memperkuat penggunaan dana yang adil dan sesuai. Penyusunan anggaran gender merupakan 'penerapan pengarusutamaan gender dalam proses penyusunan anggaran. Artinya, penilaian berbasis gender atas anggaran, yang memasukkan perspektif gender pada semua tingkat proses penyusunan anggaran dan restrukturisasi pendapatan dan pengeluaran untuk mempromosikan kesetaraan gender.<sup>37</sup>

Parlemen dapat memberikan masukan untuk penyusunan anggaran yang berkaitan dengan keamanan dalam empat tahap utama proses penyusunan anggaran:<sup>38</sup>

- Persiapan anggaran: pada tahap ini lembaga eksekutif mengajukan alokasi dana untuk beberapa keperluan tapi parlemen dan para anggotanya dapat memainkan peran dalam proses tersebut melalui berbagai mekanisme formal dan informal.

- Persetujuan anggaran: parlemen harus mampu meneliti dan menentukan kepentingan umum dan kesesuaian alokasi dana dan, dalam konteks tertentu, dapat melengkapi peruntukan dana yang berkaitan dengan keamanan dengan panduan tertentu.
- Pelaksanaan atau pengeluaran: parlemen mengkaji dan memantau pengeluaran pemerintah dan dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban. Bila ada permintaan penambahan anggaran, parlemen memantau dan meneliti permintaan ini untuk mencegah pemborosan anggaran.
- Audit atau pengkajian: parlemen meneliti apakah terjadi penyalahgunaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah. Parlemen juga mengevaluasi secara berkala seluruh anggaran dan proses audit untuk menjamin pertanggungjawaban, efisiensi dan akurasi.

Instrumen yang sering digunakan dalam penyusunan anggaran gender adalah Laporan Anggaran Sadar Gender. Laporan ini dapat dibuat berdasarkan seluruh anggaran atau bidang-bidang tertentu saja seperti sektor keamanan. Pengeluaran dan pendapatan dianalisis menurut kemungkinan dampaknya terhadap berbagai kelompok wanita dan pria, anak lelaki dan anak perempuan. Tujuannya adalah memastikan agar kebutuhan wanita dan pria dipertimbangkan dengan setara.<sup>39</sup>

Dewan Eropa menjelaskan bahwa parlemen 'merundingkan, mengubah dan akhirnya menyetujui anggaran yang diajukan oleh lembaga eksekutif, tapi mereka bisa juga mengajukan permintaan dan melakukan kegiatan lobi, dengan berpartisipasi dalam pembentukan kemauan politik dan penguatan komitmen pemerintah terhadap penyusunan anggaran gender.<sup>40</sup> Di dalam pemerintahan, prakarsa anggaran gender memberikan perhatian pada isu kesetaraan gender dalam alokasi sumber daya. Bagi para pendukung masyarakat sipil dan anggota parlemen, prakarsa tersebut merupakan alat yang berguna untuk menyerukan transparansi yang lebih besar dalam pembuatan keputusan anggaran dan pertanggungjawaban terhadap wanita.<sup>41</sup> Prakarsa penyusunan anggaran gender bertujuan mengubah proses penyusunan anggaran itu sendiri dengan meningkatkan peran lembaga legislatif dan masyarakat sipil.<sup>42</sup>

Sistem penyusunan anggaran yang sensitif terhadap gender mulai mendapat dukungan dan dilaksanakan di sejumlah negara di seluruh dunia. Misalnya, di Brazil, organisasi-organisasi masyarakat sipil bekerja sama dengan para anggota parlemen wanita mendukung anggaran yang tanggap terhadap gender.<sup>44</sup> Di Filipina, kelompok-kelompok wanita membangkitkan kesadaran mengenai pentingnya penyusunan anggaran gender

dan menekankan peran penting yang dimainkan ketentuan-ketentuan legislatif dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender.<sup>45</sup> Afrika Selatan adalah salah satu negara pertama yang menerapkan perspektif gender dalam pembuatan kebijakan

ekonominya. Prakarsa Anggaran Wanita Afrika Selatan adalah hasil dari usaha bersama para anggota parlemen dan beberapa organisasi masyarakat sipil. Prakarsa ini berfokus pada dimensi gender perpajakan dan pengeluaran dan berusaha memastikan agar proses penyusunan anggaran sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Ini adalah usaha partisipatif, yang melibatkan pembahasan pada tingkat pemerintah pusat dan daerah dan mencari masukan dari masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat sipil ditugaskan menganalisis anggaran dan kebijakan di belakangnya untuk memperkirakan dampaknya, dan para anggota parlemen menggunakan temuan penelitian tersebut dalam usaha mereka mempengaruhi

#### Kotak 4 | Alat dan metode yang digunakan parlemen untuk penyusunan anggaran gender<sup>43</sup>

**Analisis pengeluaran/pendapatan.** Untuk menganalisis keadaan wanita dan pria atau anak perempuan dan anak lelaki di sektor tertentu – atau menilai pengaruh gender dari kebijakan atau langkah-langkah kebijakan – langkah-langkah selanjutnya telah disiapkan yang menghubungkan anggaran dengan kebijakan, yang berfokus pada aspek yang berbeda (pendapatan, pengeluaran, layanan publik atau penggunaan waktu).

**Gender-disaggregated revenue incidence analysis (Analisis kejadian pendapatan yang dipisahkan menurut gender)** adalah teknik penelitian yang meneliti pajak langsung dan tak langsung dan juga uang yang dibayarkan oleh wanita dan pria.

**Gender-disaggregated public expenditure analysis (Analisis pengeluaran publik yang dipisahkan menurut gender)** membandingkan pengeluaran publik untuk program tertentu, biasanya disertai data dari survei rumah tangga, untuk mengetahui distribusi pengeluaran antara wanita dan pria atau anak perempuan dan anak lelaki.

**Gender-disaggregated beneficiary assessment (Penilaian sasaran program yang dipisahkan menurut gender)** adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada sasaran program mengenai sejauh mana program pemerintah dan/atau layanan publik memenuhi kebutuhan, keinginan dan prioritas mereka.

**Gender impact assessment (Penilaian dampak gender)** adalah evaluasi ex post (yang memandang ke belakang) atas anggaran atau evaluasi ex ante (yang memandang ke depan) atas proposal anggaran dan mungkin merupakan alat yang paling ekstensif dan kompleks untuk penyusunan anggaran gender karena penilaian ini merujuk pada pengaruh anggaran jangka pendek dan jangka panjang terhadap distribusi dan akses atas sumber daya (termasuk waktu) dan terhadap peran dan norma gender.

**Gender-aware policy appraisal (Penilaian kebijakan sadar gender)** melibatkan penelitian kebijakan dari berbagai jabatan dan program serta memberikan perhatian pada isu-isu gender implisit dan eksplisit yang terlibat. Penilaian ini mempertanyakan asumsi bahwa kebijakan menimbulkan pengaruh yang 'netral gender' dan sebaliknya mengajukan pertanyaan bagaimana kebijakan dan alokasi sumber dayanya dapat mengurangi atau meningkatkan ketidaksetaraan gender.

#### Kotak 5 | Pembangunan Aliansi

Para anggota parlemen pria dan wanita sama-sama bertanggung jawab memadukan perspektif gender ke dalam program kerja mereka. Donna Paknhurst menegaskan bahwa 'peluang keberhasilan sangat meningkat bila tanggung jawab perubahan budaya lembaga tidak diserahkan seluruhnya kepada wanita, tapi juga menjadi tanggung jawab pria'.<sup>47</sup> Agar berhasil dalam mengubah parlemen menjadi lembaga yang tanggap terhadap gender, pria dan wanita harus sama-sama memahami analisis gender.

Transformasi menuju kesetaraan gender yang lebih besar ini hanya mungkin terjadi bila pria dan wanita bekerja sama untuk mengubah kesadaran masyarakat. Sebagai suatu kelompok, pria cenderung diistimewakan dalam jenjang kekuasaan saat ini dan diperkirakan dapat menentang perubahan. Karena itu, perlu ditunjukkan pentingnya analisis gender kepada pria. Para anggota parlemen mendapatkan manfaat bila menerapkan perspektif gender dalam program kerja parlemen mereka karena analisis gender membantu mereka lebih memahami kebutuhan konstituen wanita dan pria. Tsjard Bouda dan Georg Frerks menegaskan bahwa 'kebijakan sensitivasi gender memerlukan analisis gender yang komprehensif yang menjelaskan saling keterkaitan antara gender, situasi konflik tertentu, dan kemungkinan dampak yang berbeda dari intervensi eksternal terhadap wanita dan pria'.<sup>48</sup> Misalnya, analisis gender mengungkapkan berbagai cara bagaimana wanita dan pria mengalami kekerasan seksual selama terjadinya konflik bersenjata atau menyoroti kebutuhan reintegrasi khusus anak perempuan dan anak lelaki yang telah diculik dan dipaksa bertugas dalam gerakan bersenjata yang terjadi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Contoh keberhasilan anggota parlemen wanita dan pria yang menyatukan kekuatan untuk memperkuat kesetaraan gender adalah Kelompok Parlemen Gabungan bidang urusan Wanita, Perdamaian dan Keamanan Inggris. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan menjamin pelaksanaan efektif Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325. Komite yang dipimpin oleh anggota parlemen dari Partai Buruh Joan Ruddock tersebut terdiri dari enam belas wanita dan enam pria. Komposisi gender dan fokus utama kelompok tersebut menonjol, mengingat komposisi gender tradisional berbagai komite di Inggris, termasuk komposisi gender di komite keamanan. Sebaliknya, Komite Gabungan Parlemen Inggris bidang Pertahanan hanya melibatkan satu anggota wanita dari lima belas anggotanya. Begitu pula, Komite Pertahanan yang dibentuk Majelis Rendah hanya melibatkan satu anggota parlemen wanita.

debat anggaran di parlemen.<sup>46</sup>

Strategi untuk mencapai penyusunan anggaran dan pengadaan barang yang lebih adil meliputi:

#### Penyusunan anggaran gender

- Lakukan audit gender atas semua anggaran yang diajukan dan anggaran yang sudah berjalan untuk memastikan penyediaan dana untuk menangani keamanan wanita, pria, anak lelaki, dan anak perempuan.
- Arusutamakan isu gender ke dalam anggaran yang diajukan.

#### Gender dan pengadaan peralatan pertahanan

- Pastikan tersedia dana yang akan dibelanjakan untuk seragam dan peralatan yang sesuai dengan wanita dan fasilitas yang terpisah untuk wanita dan kebutuhan kesehatan reproduksi wanita.
- Pastikan peraturan perdagangan senjata nasional melarang perdagangan dengan rezim atau orang yang melakukan GBV.

## 5 Memadukan gender ke dalam pengawasan parlementer atas sektor keamanan dalam konteks khusus

### 5.1 Negara-negara pasca-konflik

Negara-negara yang dicabik perang menghadapi tantangan khusus dalam memenuhi kebutuhan keamanan rakyatnya. Para anggota parlemen dapat memainkan peran konstruktif dalam menjamin agar isu-isu gender dipadukan ke dalam ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dalam proses perdamaian seperti perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi (DDR) dan mekanisme peradilan transisi, dan dipertimbangkan saat membahas kekerasan dan kejahatan pasca-konflik. Konteks pasca-konflik juga memberikan peluang untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen wanita sebagai bagian dari pembenahan politik dan pemilihan umum.

Selain menangani kejahatan yang dilakukan selama terjadinya perang, parlemen dapat mengambil prakarsa dalam menangani lingkungan keamanan yang muncul menyusul konflik. Kekerasan pasca-perang, apakah yang dilakukan di lingkungan publik atau pribadi, menghinggapi banyak negara. Parlemen dapat menangani isu-isu keamanan masyarakat melalui pembenahan kekuatan militer dan kepolisian,

lembaga peradilan dan pemasyarakatan, dan dengan menyetujui undang-undang yang menangani kejahatan dengan lebih baik.

#### Proses perdamaian

Idealnya, parlemen memainkan peran dalam pencegahan konflik atau keamanan preventif. Namun demikian, bila konflik terjadi, parlemen dapat memainkan peran konstruktif dalam perundingan perdamaian dan perjanjian perdamaian selanjutnya. Perjanjian perdamaian ini sering berperan sebagai kerangka bagi reformasi sektor keamanan dan dengan demikian memadukan isu-isu gender pada tahap awal sangat penting. Para anggota parlemen dapat melibatkan diri secara langsung ke dalam proses perundingan dan merupakan forum penting untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai proses perdamaian formal dan informal yang terjadi di negara mereka.

Misalnya, para anggota parlemen dapat menjadi pendukung proses perundingan yang sepenuhnya melibatkan wanita. Dalam kasus di mana parlemen itu sendiri sudah mendapatkan keterwakilan di meja perundingan, para anggota parlemen wanita harus dilibatkan dalam delegasinya. Komposisi tim perunding yang lebih seimbang memberikan isyarat awal penting bahwa dimensi gender suatu konflik akan dipertimbangkan selama proses perundingan dan memberikan peluang yang lebih besar bahwa perspektif gender mempengaruhi perjanjian perdamaian dan kesepakatan keamanan yang dicapai. Anggota parlemen memainkan peran penting karena mereka dapat menunda persetujuan perjanjian yang tidak didasarkan pada proses yang inklusif gender dan, oleh karena itu, sah. Parlemen yang menekankan dimensi gender dari penyelesaian konflik didukung oleh konsensus internasional yang menyatakan bahwa segala proses perdamaian yang 'tidak melibatkan wanita dalam penetapan agenda, pembicaraan penting dan pelaksanaan tidak memiliki legitimasi demokratis'.<sup>49</sup>

Bila wanita tidak dilibatkan, ada kecenderungan alami untuk hanya berfokus pada pengalaman konflik pria dan harapan mereka terhadap penyelesaian konflik, yang tidak mempertimbangkan kebutuhan aktor pria dan wanita dan posisi mereka masing-masing dalam struktur masyarakat.<sup>50</sup> Partisipasi wanita melengkapi proses tersebut karena wanita 'mungkin memberikan kontribusi yang berbeda terhadap proses perdamaian. Bila dibandingkan dengan pria, wanita lebih mungkin memasukkan isu gender ke dalam agenda, memasukkan pengalaman konflik yang lain, dan menentukan prioritas yang berbeda untuk pembangunan perdamaian dan rehabilitasi, dan mereka dapat menjembatani perbedaan politik dengan lebih baik.'<sup>51</sup>

Di negara-negara yang mengalami konflik, tahap pelaksanaan perjanjian perdamaian memerlukan perhatian khusus parlemen. Perjanjian perdamaian dan pembentukan konstitusi selanjutnya memberikan peluang penting bagi negara-negara yang baru keluar dari konflik untuk mengubah sistem politik mereka menuju kesetaraan gender yang lebih besar. Parlemen dapat memantau perundingan perdamaian resmi dan mendukung prakarsa informal yang berasal dari masyarakat sipil.

## Kotak 6 Transformasi proses DDR: peran parlemen<sup>52</sup>

Fungsi legislatif dan pengawasan parlementer memberi mereka peran institusi penting dalam menjamin agar gender benar-benar dipertimbangkan dalam proses DDR. Anggota parlemen dapat memastikan agar kebutuhan kombatan pria dan wanita masing-masing diidentifikasi sejak awal. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan agar proses perlucutan senjata itu sendiri sensitif terhadap gender. Di Uganda, parlemen memainkan peran aktif mengunjungi kamp-kamp demobilisasi untuk menyelidiki kondisi para petempur pria dan wanita. Selanjutnya, parlemen mendesak pemerintah mengambil tindakan. Di Amerika Latin, anggota parlemen Kolombia semakin tertarik pada isu-isu demobilisasi yang dihadapi konstituen mereka. Untuk memainkan peran konstruktif dalam demobilisasi kombatan, anggota parlemen harus memahami peran kompleks wanita dan pria dalam perang, dan juga kebutuhan bergender mereka pada masa damai.

### Perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi

Penyelesaian konflik yang kejam melibatkan perlucutan senjata dan demobilisasi pasukan kombatan. Proses DDR yang efektif mengakui bahwa wanita dan pria mengalami dampak perang yang berbeda dan memenuhi kebutuhan mantan kombatan pria maupun wanita, dan juga wanita dan anak-anak yang berkaitan dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok perlawanan. Parlemen dapat memainkan peran konstruktif sebagai pendukung proses DDR yang tanggap terhadap gender (lihat Kotak 6). Kebutuhan wanita dan anak perempuan yang menjadi bagian dari atau berkaitan dengan angkatan bersenjata non-reguler sering terabaikan dalam proses DDR. Aspek gender lainnya meliputi konsultasi, pendidikan, dan reintegrasi efektif mantan kombatan pria untuk menghilangkan risiko mereka menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya dalam kehidupan mereka pasca-konflik.

Restrukturisasi sektor keamanan segera setelah berakhirnya konflik merupakan peluang penting bagi parlemen untuk menciptakan pasukan keamanan yang bersifat mewakili. Menyusul konflik, negara-negara seperti El Salvador, Guatemala, Mozambik atau Liberia memadamkan para mantan kombatan ke dalam kepolisian dan kekuatan militer yang sudah terbentuk. Data demobilisasi yang dikumpulkan oleh misi perdamaian PBB di seluruh dunia menunjukkan bahwa wanita mencapai 30% dari petempur berbagai kekuatan pemberontak. Dengan demikian, terdapat sumber perekrutan, yang memungkinkan transformasi kepolisian dan kekuatan militer tradisional menjadi kepolisian dan kekuatan militer dengan komposisi gender yang lebih seimbang.

Lihat Tool (Alat) mengenai Reformasi Pertahanan dan Gender

### Peradilan transisi

Parlemen memainkan peran penting dalam memastikan agar pertimbangan gender diperhatikan dalam pelaksanaan peradilan pasca-konflik. Pertanggungjawaban publik atas kejahatan yang dilakukan selama terjadinya konflik, termasuk kejahatan yang berbasis gender, sangat penting demi keberhasilan rekonstruksi sosial. Walaupun wanita cenderung menjadi sasaran utama prakarsa peradilan gender, perspektif gender juga membantu lebih memahami korban kekerasan

pria. Fungsi legislatif dan pengawasan parlementer, ditambah dengan kewenangan anggarannya, memberikan peluang kepada anggota parlemen untuk menangani isu-isu peradilan pasca-perang. Parlemen bisa menjadi tempat debat publik mengenai berbagai isu pasca-konflik yang menjadi pemecah-belah, dan memainkan peran penting dalam mempromosikan toleransi.<sup>53</sup>

Parlemen ikut bertanggung jawab membentuk lembaga pencari fakta, seperti komisi kebenaran, yang mencatat kasus kejahatan yang dilakukan selama terjadinya konflik. Mereka juga berpartisipasi dalam pembentukan pengadilan khusus untuk menuntut para pelanggar hukum. Parlemen dapat menuntut agar komposisi gender lembaga-lembaga ini setara dan agar perspektif gender mempengaruhi program kerja dan kebijakan mereka. Parlemen melakukan kontrol signifikan atas kerja komisi-komisi ini karena mereka menyetujui enabling legislation (perundang-undangan yang memungkinkan), berpartisipasi dalam pengangkatan anggota komisi, mengalokasikan dana operasional, dan mengawasi pelaksanaan temuan komisi.<sup>54</sup>

Selama 30 tahun terakhir, lebih dari dua lusin komisi kebenaran dan pencari fakta telah dibentuk pada tingkat internasional dan nasional untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik.<sup>55</sup> Wanita telah memimpin dua dari komisi tersebut, Komisi Penyelidikan Internasional PBB, yang menyelidiki pelanggaran Undang-Undang Kemanusiaan Internasional di Timor Timur, dan Komisi Provinsi Barat dan Selatan Sri Lanka.<sup>56</sup>

Parlemen juga dapat menjamin akses setara atas laporan kepada komisi kebenaran dan rekonsiliasi dengan memperhatikan kebutuhan khusus korban pria dan wanita (lihat Kotak 7). Misalnya, anggota parlemen dapat mendesak agar sebagian sesi disediakan khusus untuk mendengarkan kesaksian dari korban wanita dan/atau mendesak agar satu bab dari laporan komisi tersebut disediakan untuk GBV. Dibandingkan dengan korban pria, wanita yang menjadi korban lebih kecil kemungkinannya mendapatkan akses atas proses peradilan karena mereka biasanya tidak memiliki kemampuan ekonomi dan harus mengerjakan lebih banyak tugas keluarga dan rumah tangga, yang membatasi mobilitas mereka.<sup>61</sup> Parlemen juga dapat memasukkan kompensasi korban ke dalam agenda nasional, yang berhasil dilakukan parlemen Ivory Coast (Pantai Gading) ketika lembaga eksekutif tidak dapat bertindak.<sup>62</sup> Sekelompok anggota parlemen berperan sebagai pembela korban dan melobi parlemen agar bertindak. Skema kompensasi juga

## Kotak 7 | Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan: memadukan isu gender

Pengalaman Afrika Selatan memberikan contoh keberhasilan keterlibatan parlemen dalam memasukkan dimensi gender dalam pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Para anggota parlemen Afrika Selatan, yang mewakili partai-partai politik negara tersebut, bersama dengan para pemimpin organisasi masyarakat sipil, membentuk komite seleksi yang memainkan peran penting dalam menentukan komposisi anggota komisi kebenaran. Berdasarkan 300 calon yang diterima dalam proses publik, komite seleksi menetapkan daftar 25 finalis.<sup>57</sup> Presiden Nelson Mandela memilih 15 anggota komisi dari daftar ini. Sepertiga dari anggota komisi tersebut adalah wanita.<sup>58</sup> Kuota ini mencerminkan komitmen Partai Kongres Nasional Afrika untuk menyediakan sepertiga jabatan pembuat keputusan kepada wanita. Komitmen untuk memperkuat kesetaraan gender diubah menjadi suatu keseimbangan gender yang jauh lebih baik di parlemen di mana wanita mendapatkan hampir 33% dari kursi yang tersedia pada tahun 2006.

Meskipun telah dilakukan pelibatan signifikan wanita dalam komisi tersebut, komisi tersebut melakukan penyelidikan ketika organisasi-organisasi wanita melaporkan bahwa pria mendapatkan akses istimewa dan pengalaman wanita dipinggirkan. Para wanita enggan membicarakan pemerkosaan dan kejadian kekerasan seksual lainnya di depan para anggota komisi pria. Gerakan wanita tersebut berhasil mendesak pemasukan isu gender dalam agenda komisi tersebut.<sup>59</sup> Dalam usaha untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan wanita, semua anggota komisi mendapat pelatihan gender dan komisi tersebut mengadakan beberapa sesi khusus wanita.<sup>60</sup>

harus dirancang dengan cara yang sensitif terhadap gender, yang mengakui penganiayaan tertentu yang dialami pria dan wanita selama terjadinya konflik dan kebutuhan pemulihan khusus mereka.

Lihat Tool (Alat) mengenai Reformasi Peradilan dan Gender

### Kekerasan dan kejahatan pasca-konflik

Meskipun kejahatan berbasis gender yang dilakukan selama perang telah diakui sebagai kejahatan perang, sedikit sekali perhatian yang diberikan terhadap bagaimana kondisi yang berkaitan dengan konflik mempengaruhi keberlanjutan kekerasan di dalam rumah tangga setelah berakhirnya permusuhan.<sup>63</sup> Peningkatan pemahaman mengenai isu gender dapat membantu anggota parlemen memahami pentingnya penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan stres pasca-konflik yang dialami oleh mantan kombatan pria maupun wanita dan orang-orang yang terusir dari kampung halamannya. Penelitian PBB menemukan peningkatan besar kekerasan dalam rumah tangga di daerah yang pernah mengalami konflik, yang semakin diperparah oleh tersedianya senjata, kekerasan yang dialami atau dilakukan anggota keluarga, kurangnya lapangan kerja, tempat tinggal, dan fasilitas pokok. Orang-orang yang terusir dari kampung halamannya sangat rentan terhadap kekerasan.<sup>64</sup>

Amerika Tengah pasca-konflik memberikan contoh transformasi kekerasan yang berkaitan dengan perang menjadi gelombang kejahatan yang mempengaruhi sektor publik maupun sektor pribadi.<sup>65</sup> Meskipun kekerasan politik mereda menyusul tercapainya perjanjian perdamaian, kekerasan kriminal meningkat. Semakin banyak wanita yang menjadi korban. Guatemala mencatat kasus pembunuhan 383 wanita pada tahun 2003, yang meningkat 135% dibandingkan dengan tahun 2002. Pada tahun 2004, 527 wanita dibunuh. Selama delapan bulan pertama tahun 2005, korban tewas mencapai 427, yang membuktikan bahwa tingkat pembunuhan terus meningkat.<sup>66</sup> Walaupun kekerasan yang ditujukan terhadap wanita merupakan bagian dari gelombang kejahatan umum

yang melanda negara tersebut, tingkat pembunuhan wanita lebih tinggi daripada tingkat pembunuhan pria.

Walaupun wanita sangat menderita dalam kondisi kekerasan pasca-konflik, perlu disadari bahwa kasus kekerasan yang terjadi di negara-negara yang pernah dicabik perang juga dialami pria dalam jumlah yang tidak seimbang. Misalnya, di Kolombia seperempat dari semua kematian pria berkaitan dengan kekerasan, begitu pula 60% dari kematian pria berusia antara 15 sampai 44 tahun.<sup>67</sup> Pria Kolombia empat kali lebih rentan mengalami kematian akibat kekerasan dibandingkan dengan wanita.<sup>68</sup> Secara umum, sebagian besar korban kekerasan senjata dan kekerasan gang adalah pria, namun sebagian besar pelaku utama kekerasan juga pria.

Para anggota parlemen di Amerika Tengah dan kawasan lainnya di dunia semakin khawatir terhadap penyebaran senjata api kecil, yang digunakan dalam sebagian besar kasus pembunuhan ini. Belakangan ini, para anggota Kongres Guatemala meminta dan mengarahkan penelitian mengenai kasus 'femicide' (pembunuhan wanita) di Guatemala. Hasil penelitian ini telah disampaikan dalam sejumlah forum yang menyoroti masalah kekerasan senjata pria dan korbannya.

### Parlemen yang bersifat mewakili

Konteks pasca-konflik juga memberikan peluang transformasi parlemen itu sendiri. Konteks ini memberikan peluang kepada anggota parlemen untuk mengubah komposisi mereka dan untuk menjadi lembaga yang benar-benar bersifat mewakili (lihat Tabel 3). Transformasi parlemen menuju komposisi gender yang lebih setara merupakan indikator penting bahwa kesetaraan gender diberi prioritas dalam rekonstruksi sosial.

Fokus internasional pada usaha meningkatkan peran wanita dalam pembuatan keputusan politik telah menjadi pendorong bagi pemerintah di negara-negara yang mengalami konflik untuk memperkuat keseimbangan gender parlemen mereka. Ini umumnya dilakukan dengan bantuan kuota legislatif dan konsultasi. Afghanistan dan Irak adalah contoh keberhasilan terbaru pelaksanaan kuota konstitusi (lihat Kotak 8).

Tabel 3   Memprakarsai perubahan menyusul perang: komposisi gender parlemen pasca-konflik <sup>69</sup>		
Negara	% Wanita	% Pria
Rwanda (2003)	48,8	52,2
Mozambik (2004)	34,8	65,2
Afrika Selatan (2004)	32,8	67,2
Burundi (2005)	30,5	69,5
Uganda (2006)	29,8	70,2
Timor-Leste (2007)	27,7	72,3
Afghanistan (2005)	27,3	72,7
Irak (2005)	25,5	74,5

### 5.2 Negara-negara maju

Parlemen di negara-negara maju menghadapi berbagai tantangan dalam negeri yang sama sehubungan dengan reformasi sektor keamanan sebagaimana rekan mereka di negara-negara berkembang, walaupun dengan posisi yang berbeda. Misalnya, parlemen Eropa dan Amerika Utara harus menunjukkan kewenangan mereka dalam mengawasi misi perdamaian atau intervensi militer. Misi NATO di Afghanistan dan kawasan Balkan, intervensi pimpinan Amerika Serikat di Irak atau intervensi kemanusiaan pimpinan PBB di Haiti adalah sebagian contoh terbaru. Perjanjian kerja sama internasional dan regional menimbulkan tantangan terhadap efektivitas pengawasan parlementer. Dalam semua kasus tersebut, parlemen harus memastikan agar kebijakan keamanan dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan Hukum Kemanusiaan Internasional.<sup>71</sup> Instrumen hukum internasional – terutama Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 – yang memerintahkan pertimbangan sungguh-sungguh atas isu-isu gender dalam semua operasi perdamaian dan keamanan, sangat relevan.

Beberapa negara telah menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 sebagai titik mula penting untuk melakukan reformasi dan telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk pelaksanaannya atau sedang dalam proses penyusunannya. Dalam kebanyakan kasus rencana tersebut merujuk pada pembahasan isu gender di sektor keamanan negara bersangkutan dan pada aspek gender dari pemeliharaan perdamaian dan rekonstruksi pasca-konflik

(dalam sebagian kasus termasuk reformasi sektor keamanan). Austria, Denmark, Norwegia, Swedia, Swis, dan Inggris semuanya telah selesai menyusun Rencana Aksi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325, dan Kanada sedang dalam proses menyusun rencana aksi serupa.

Fokus utama rencana Swedia, yang dimulai pada tahun 2006, berkaitan dengan operasi pemeliharaan perdamaian. Rencana tersebut mengarahkan Angkatan Bersenjata untuk mempersiapkan ‘usaha-usaha terencana untuk meningkatkan jumlah wajib militer dan perwira wanita yang dapat berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian’ dan membuat proyek seperti GenderForce (Pasukan Gender) untuk mempersiapkan langkah-langkah untuk ‘memasukkan perspektif gender ke dalam operasi internasional’. Begitu pula, Badan Kepolisian Negara ‘melakukan usaha-usaha khusus untuk meningkatkan jumlah wanita dalam kontingen Swedia dalam operasi dukungan perdamaian’.<sup>72</sup> Selanjutnya, semua anggota operasi pemeliharaan perdamaian diharapkan akan mendapat pelatihan gender.

Para anggota parlemen ikut bertanggung jawab atas penyusunan rencana aksi nasional. Usaha-usaha untuk menyusun rencana aksi nasional Kanada menekankan pentingnya dukungan dan dorongan anggota parlemen terhadap usaha untuk menyusun rencana tersebut, dengan meminta Komite Tetap bidang Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Internasional dan Kaukus Anggota Parlemen Wanita untuk ‘memberikan perhatian mengenai masalah ini dan bahkan memainkan peran dalam pelaksanaannya’.<sup>73</sup>

Kotak 8   Penerapan kuota konstitusi: pembenahan di Afghanistan dan Irak <sup>70</sup>	
<p>Afghanistan berubah dari negara di mana hak-hak wanita sangat dibatasi menjadi negara yang menjamin kesetaraan gender menurut undang-undang. Dalam bidang keterwakilan politik, konstitusi baru tersebut menjamin pelibatan formal wanita dalam proses pembuatan keputusan politik. Pasal 82 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya dua calon wanita dari setiap provinsi harus dipilih sebagai anggota parlemen. Ketentuan konstitusi ini berhasil dilaksanakan. Pada pemilihan umum bulan September 2005, 69 wanita terpilih sebagai anggota Wolesi Jirga (majelis rendah parlemen), yang merupakan sekitar 27% dari 249 anggota majelis tersebut.</p> <p>Begitu pula, konstitusi baru Irak, yang disahkan pada bulan Oktober 2005, menjamin seperempat dari 275 kursi parlemen untuk wanita. Kuota konstitusi juga diterapkan di Irak. Setelah pemilihan umum bulan Desember 2005, wanita mencapai seperempat dari keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Nasional. Dua hasil pemilihan umum ini sangat signifikan di kawasan di mana wanita tetap kurang terwakili dalam pembuatan keputusan politik dan, dalam sebagian kasus, wanita tidak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara.</p>	

## 6 Rekomendasi penting bagi anggota parlemen

1. Dukung penandatanganan, pengesahan, dan pelaksanaan perjanjian dan konvensi internasional dan regional yang memerintahkan pemasukan isu gender ke dalam reformasi sektor keamanan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).
2. Tingkatkan keterwakilan anggota parlemen wanita melalui penerapan kuota, dengan memperbaiki sistem pemilihan umum dan mendukung pembangunan kemampuan di kalangan calon wanita.
3. Tingkatkan keterwakilan anggota parlemen wanita dalam komite yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, termasuk persetujuan undang-undang mengenai keterwakilan setara wanita dan pria atau sistem kuota komite parlemen.
4. Bangun kemampuan gender anggota parlemen pria dan wanita, terutama para anggota komite pertahanan dan keamanan, melalui pengarahan, pelatihan dan prakarsa peningkatan kesadaran lainnya.
5. Libatkan masyarakat sipil, terutama organisasi-organisasi wanita, dalam pembuatan kebijakan keamanan melalui konsultasi secara luas, dengar pendapat publik, dan mekanisme formal dan informal lainnya.
6. Bentuk kaukus gender yang melibatkan wanita maupun pria untuk membangkitkan kesadaran mengenai dan dukungan terhadap penyusunan anggaran dan pembuatan undang-undang yang tanggap terhadap gender.
7. Terapkan dan perkuat prakarsa anggaran gender dan lakukan penilaian dampak gender dari kebijakan keamanan.
8. Minta data yang dipisahkan menurut jenis kelamin mengenai pengarusutamaan gender dan komposisi lembaga-lembaga sektor keamanan agar para pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat.
9. Pantau pengerahan dan pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian untuk memastikan agar wanita benar-benar terwakili dalam pasukan pemeliharaan perdamaian dan agar berbagai prakarsa diambil untuk mencegah eksploitasi dan penganiayaan seksual, dan bangun kemampuan staf pemeliharaan perdamaian untuk memadukan isu gender.

### *Khusus untuk konteks pasca-konflik:*

10. Gunakan parlemen sebagai forum untuk memadukan isu gender dan menjamin partisipasi wanita dalam proses perdamaian.
11. Minta agar wanita dilibatkan sepenuhnya dan isu

gender dimasukkan dalam komisi kebenaran, pengadilan khusus, dan program pemulihan, termasuk melalui pembuatan undang-undang yang mendukung pembentukannya.

12. Reformasi sistem peradilan agar lebih efektif memberantas kekerasan berbasis gender.

# 7 Sumber Daya Tambahan

## Situs yang Berguna

Association of European Parliamentarians for Africa (Perhimpunan Anggota Parlemen Eropa untuk Afrika) - <http://www.awepa.org>

I Know Politics (Saya Tahu Politik) - <http://www.iknowpolitics.org>

Initiative for Inclusive Security (Prakarsa Keamanan yang Inklusif) -

<http://www.womenwagingpeace.net>

International Development Research Center (Pusat Penelitian Pembangunan Internasional) -

<http://www.idrc.ca>

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (Institut Demokrasi dan Bantuan Elektoral Internasional) -

<http://www.idea.int>

Inter-Parliamentary Union (IPU) (Persatuan Antar-Parlemen) - <http://www.ipu.org>

UNDP (Program Pembangunan PBB), 'In focus: Parliaments and Gender Mainstreaming' ('Dalam Sorotan: Parlemen dan Pengarusutamaan Gender) -

[http://www.undp.org.vn/projects/vie02007/in\\_focus/gender.htm](http://www.undp.org.vn/projects/vie02007/in_focus/gender.htm)

UNIFEM (Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan) -

<http://www.unifem.org/www/genderbudgets/work/html>

## Panduan praktis dan buku pedoman

Byanyima, W. dan Wehner, J., **Parliament, the Budget and Gender (Parlemen, Anggaran, dan Gender)**, Buku Pedoman IPU, 2004. [http://www.ipu.org/PDF/publications/budget\\_en.pdf](http://www.ipu.org/PDF/publications/budget_en.pdf)

Born, H., Fluri, P. dan Johnson, A. penyunting, **Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, mechanisms and practices (Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan: Prinsip, mekanisme, dan praktik)**, DCAF dan IPU, 2003. <http://dcaf.dev.isn.ch/publications/kms/details.cfm?In g=en&id=25289&nav1=4>

Freeman, M., **Making Reconciliation Work: the Role of Parliaments (Mewujudkan Rekonsiliasi: Peran Parlemen)**, Buku Pedoman IPU, 2005. [http://www.ipu.org/PDF/publications/reconciliation\\_en.pdf](http://www.ipu.org/PDF/publications/reconciliation_en.pdf)

## Artikel dan laporan online

Luciak, I.A., **Conflict and a Gendered Parliamentary Response (Konflik dan Respons Bergender Parlemen)**, April 2006. <http://www.parlcp.undp.org/docs/conference/Luciak.pdf>

O'Brien, M., **Report on Wilton Park Conference WP784: Promoting Good Governance and Development in Conflict-Countries: The Role of Parliament and Government (Laporan Konferensi Wilton Park WP784: Mempromosikan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pembangunan di Negara-negara yang Mengalami Konflik: Peran Parlemen dan Pemerintah)**, 2005. [http://www.iraqtradeunions.org/archives/cat\\_activitie s\\_abroad.html](http://www.iraqtradeunions.org/archives/cat_activitie s_abroad.html)

## Buku dan publikasi non-online lainnya

IPU/Institute for Democracy and Electoral Assistance (Institut Demokrasi dan Bantuan Elektoral), **Making Reconciliation Work: The Role of Parliaments (Mewujudkan Rekonsiliasi: Peran Parlemen)**, 2005.

Anderlini, S.N., **Women at the Peace Table: Making a Difference (Wanita di Meja Perundingan Perdamaian: Menciptakan Perbedaan)**, New York: UNIFEM, 2000.

World Bank Institute and Commonwealth Parliamentary Association (Institut Bank Dunia dan Perhimpunan Parlemen Persemakmuran), **Parliaments as Peacebuilders. The Role of Parliaments in Conflict-Affected Countries (Parlemen sebagai Pembangun Perdamaian. Peran Parlemen di Negara-negara yang Mengalami Konflik)**. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank (Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional/Bank Dunia), 2005.



## CATATAN AKHIR

- 1 Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata) (DCAF) dan Inter-Parliamentary Union (Persatuan Antar-Parlemen) (IPU), *Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices* (Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme, dan Praktik), (DCAF dan IPU: Jenewa), 2003, h. 22.
- 2 DCAF dan IPU, 'Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices' ('Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme, dan Praktik'), (DCAF dan IPU: Jenewa), 2003.
- 3 Saalfeld, T., 'Members of Parliament and Governments in Western Europe: Agency Relations and Problems of Oversight' ('Anggota Parlemen dan Pemerintah di Eropa Barat: Hubungan Lembaga dan Masalah Pengawasan'), *European Journal of Political Research* (Jurnal Penelitian Politik Eropa) 37 (2000), h. 372.
- 4 UN Economic and Social Council, Report of the Secretary-General (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Laporan Sekretaris Jenderal), *Coordination of the Policies and Activities of the Specialized Agencies and Other Bodies of the United Nations System: Mainstreaming the Gender Perspective into all Policies and Programmes in the United Nations system* (Koordinasi Kebijakan dan Kegiatan Lembaga Khusus dan Lembaga Lainnya dalam Sistem PBB: Pengarusutamaan Perspektif Gender ke dalam semua Kebijakan dan Program dalam Sistem PBB), 12 Juni 1997.
- 5 Anderlini, S.N. dan Conaway, C.P., *Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital Contributions of South African Women* (Perundingan Transisi menuju Demokrasi dan Reformasi Sektor Keamanan: Kontribusi Penting Wanita Afrika Selatan), (Initiative for Inclusive Security [Prakarsa Keamanan yang Inklusif], Washington DC), 2004, h.17-18; 23-25.
- 6 Werczberger, R., 'The Advancement of the Status of Women in Israel' ('Peningkatan Status Wanita di Israel'), 2001.  
[http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society\\_&\\_Culture/women2001.html](http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Culture/women2001.html)
- 7 Untuk masalah ini lihat laporan terbaru dari Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Untuk pengakuan tingkat nasional, lihat misalnya, 'The Swedish Government's action plan to implement Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security' ('Rencana Aksi Pemerintah Swedia untuk Melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan).
- 8 IPU, tanggal 31 Agustus 2007.  
<http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>
- 9 Luciak, I., *Conflict and a Gendered Parliamentary Response* (Konflik dan Respons Bergender Parlemen), h.39; *Perhimpunan Anggota Parlemen Eropa untuk Afrika (AWEPA), The Role of Parliaments in Conflict Management and Peacebuilding* (Peran Parlemen dalam Manajemen Konflik dan Pembangunan Perdamaian), September 2006, h.66; Powley, E., *Rwanda: The Impact of Women Legislators on Policy Outcomes Affecting Children and Families* (Rwanda: Pengaruh Anggota Parlemen Wanita terhadap Hasil Kebijakan yang Mempengaruhi Anak-anak dan Keluarga), Dana Anak-anak PBB (UNICEF), Desember 2006, h.11.
- 10 Report of the Learning-Oriented Assessment of Gender Mainstreaming and Women's Empowerment Strategies in Rwanda (Laporan Penilaian Berorientasi Belajar mengenai Pengarusutamaan Gender dan Strategi Pemberdayaan Wanita di Rwanda), 2-12 September 2002, (UNIFEM, New York) 2003, dikutip oleh Anderlini, S.N. dan El-Bushra, J. dalam 'Post-Conflict Reconstruction' ('Rekonstruksi Pasca-Konflik) dalam *Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action* (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit Dukungan dan Tindakan), International Alert and Initiative for Inclusive Security (Kewaspadaan dan Prakarsa Internasional untuk Keamanan Inklusif), 2004, h.64.
- 11 DCAF dan IPU, *Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices* (Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme, dan Praktik), (DCAF dan IPU: Jenewa), 2003, h.130.
- 12 IPU, 'The Participation of Women and Men in Decision-Making: The Parliamentary Dimension' ('Partisipasi Wanita dan Pria dalam Pembuatan Keputusan: Dimensi Parlemen'), Makalah pendukung, The Expert Group Meeting on 'Equal Participation of Women and Men in Decision-making Processes, with Particular Emphasis on Political Participation and Leadership' (Pertemuan Kelompok Pakar Membahas 'Partisipasi Setara Wanita dan Pria dalam Proses Pembuatan Keputusan, dengan Penekanan Khusus pada Partisipasi dan Kepemimpinan Politik), Addis Ababa, Ethiopia, 24-27 Oktober 2005, h.6.
- 13 IPU/UNDP/World Bank Institute (Institut Bank Dunia)/UNIFEM, *Parliament, the Budget and Gender* (Parlemen, Anggaran, dan Gender), h. 69.
- 14 Council of Europe (Dewan Eropa), *Gender Budgeting (Penyusunan Anggaran Gender)* (Council of Europe [Dewan Eropa]: Strasbourg), 2005, h. 28-36.
- 15 IPU, 'The Participation of Women and Men in Decision-Making: The Parliamentary Dimension' ('Partisipasi Wanita dan Pria dalam Pembuatan Keputusan: Dimensi Parlemen'), h.2.
- 16 IPU, Agustus 2007.
- 17 IPU melaporkan dalam IPU dan DCAF, *Parliamentary Oversight of the Security Sector* (Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan), 1997, h. 46.
- 18 Anderlini, S.N. dan Conaway, C.P., 'Security Sector Reform' ('Reformasi Sektor Keamanan'), *Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action* (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit Dukungan dan Tindakan), International Alert and Women Waging Peace (Kewaspadaan Internasional dan Wanita Pejuang Perdamaian), 2004, h.35-36.
- 19 Melander, E., 'Gender Equality and Intrastate Armed Conflict' ('Kesetaraan Gender dan Konflik Bersenjata Intra-Negara'), *International Studies Quarterly* (Jurnal Triwulan Kajian Internasional), 49.4 (2005), h.706.
- 20 O'Brien, M., 'Parliaments as Peacebuilders: The Role of Parliaments in Conflict-Affected Countries' ('Parlemen sebagai Pembangun Perdamaian: Peran Parlemen di Negara-negara yang Mengalami Konflik'), *Working Papers* (Makalah Kerja), Series on Contemporary Issues in Parliamentary Development (Seri Isu-isu Kontemporer dalam Pembangunan Parlemen), World Bank Institute (Institut Bank Dunia) dan

- Commonwealth Parliamentary Association (Perhimpunan Parlemen Persemakmuran), (World Bank [Bank Dunia]: Washington DC), 2005, h.1.
- 21 UNDP/IPU, 'Global Study Group Meeting: Strengthening the Role of Parliaments in Conflict and Post-Conflict Situations ('Pertemuan Kelompok Kajian Global: Penguatan Peran Parlemen dalam Situasi Konflik dan Pasca-Konflik), Final Draft Report (Rancangan Akhir Laporan)', (IPU: Jenewa), 20-22 Juli 2005, h.14.
- 22 UNDP/IPU, 'Global Study Group Meeting: Strengthening the Role of Parliaments in Conflict and Post-Conflict Situations ('Pertemuan Kelompok Kajian Global: Penguatan Peran Parlemen dalam Situasi Konflik dan Pasca-Konflik), Final Draft Report (Rancangan Akhir Laporan)', (IPU: Jenewa), 20-22 Juli 2005, h.12.
- 23 Van Brabant, K., 'Strengthening Parliaments in Conflict and Post-Conflict Situations: Drawing on Select Experiences from Africa' ('Penguatan Parlemen dalam Situasi Konflik dan Pasca-Konflik: Memanfaatkan Beberapa Pengalaman dari Afrika'), Rancangan yang disiapkan untuk the UNDP/UIP Global Study Group Meeting on Strengthening the Role of Parliaments in Conflict and Post-Conflict Situations ('Pertemuan Kelompok Kajian Global: Penguatan Peran Parlemen dalam Situasi Konflik dan Pasca-Konflik), Jenewa, 20-22 Juli 2005 (tak diterbitkan), h.24.
- 24 Human Rights Watch (Pengawas HAM), 'Struggling To Survive: Barriers to Justice for Rape Victims in Rwanda' ('Berjuang untuk Bertahan Hidup: Hambatan Keadilan bagi Korban Pemerkosaan di Rwanda), Laporan Human Rights Watch 16:10(A)(2004). <http://hrw.org/reports/2004/rwanda0904/rwanda0904.pdf>
- 25 Novovic S. dan Petrovic, D., 'Women in Policing' ('Wanita dalam Perpolisian') (Republic of Serbia Ministry of Interior Police College [Sekolah Tinggi Kepolisian Departemen Dalam Negeri Serbia]: Belgrad), April, 2006, h.35.
- 26 Potter, A., We the Women: Why Conflict Mediation is Not Just a Job for Men (Kita para Wanita: Mengapa Mediasi Konflik Bukan Hanya Tugas Pria) (Centre for Human Dialogue [Pusat Dialog Kemanusiaan]: Jenewa), 2005, h.16.
- 27 Lithander A. dan lainnya., Engendering the Peace Process: A Gender Approach to Dayton and Beyond (Penggenderan Proses Perdamaian: Pendekatan Gender pada [perjanjian perdamaian] Dayton dan Melewatinya) (Yayasan Kvinna till Kvinna: Stockholm), 2001, dikutip oleh Bouta, T. dan Frerks, G. dalam Women's Role in Conflict Prevention, Conflict Resolution and Post-Conflict Reconstruction: Literature Review and Institutional Analysis (Peran Wanita dalam Pencegahan Konflik, Penyelesaian Konflik, dan Rekonstruksi Pasca-Konflik: Tinjauan Literatur dan Analisis Kelembagaan) (Netherlands Institute of International Relations [Institut Hubungan Internasional Belanda] – Clingendael Conflict Research Unit (Unit Penelitian Konflik Clingendael): Den Haag), 2002, h. 45. Perlu ditegaskan bahwa pelibatan wanita dalam kepolisian dalam konteks pasca-perang mungkin disebabkan oleh tekanan yang dilakukan masyarakat internasional. Misalnya, di Kosovo OSCE memerintahkan pemasukan wanita maupun kelompok etnis minoritas ke dalam kepolisian. (Untuk masalah ini saya mengucapkan kasih kepada Rita Taphorn.)
- 28 Burke, E., Klot, J. dan Ikaweba, B., Engendering Peace: Reflections on the Burundi Peace Process (Penggenderan Perdamaian: Pemikiran mengenai Proses Perdamaian di Burundi), African Women for Peace Series (Seri Wanita Afrika untuk Perdamaian) (UNIFEM: Nairobi), 2001, Lampiran 1.
- 29 Moser, C. dan Clark, F.C., 'The Gendered Continuum of Violence and Conflict: An Operational Framework', ('Rangkaian Kekerasan dan Konflik Bergender: Kerangka Operasional'), Victims, Perpetrators or Actors? (Korban, Pelaku atau Aktor?) Gender, Armed Conflict and Political Violence (Gender, Konflik Bersenjata dan Kekerasan Politik), (Zed Books: London dan New York), 2001, h.30.
- 30 Bouta, Frerks dan Bannon, h.34.
- 31 Bouta, Frerks dan Bannon, h.47.
- 32 Human Rights Watch (Pengawas HAM), 'Struggling To Survive: Barriers to Justice for Rape Victims in Rwanda' ('Berjuang untuk Bertahan Hidup: Hambatan Keadilan bagi Korban Pemerkosaan di Rwanda), Supra, h.32.
- 33 Dahlerup, D. dan Freidenvall, L., 'Quotas as a fast track to equal representation for women' ('Kuota sebagai jalur cepat menuju keterwakilan setara bagi wanita'), International Feminist Journal of Politics (Jurnal Politik Feminis Internasional) 7.1 (2005), h.26.
- 34 Institut Pembangunan Sosial PBB (UNRISD) (2005); IPU, 'Women in National Parliaments' ('Wanita di Parlemen Nasional'), 31 Agustus 2007; IDEA, Profil Negara, 2007.
- 35 Siaran Berita Isha L'Isha, 'Parliament/Knesset Passes New Law Mandating Inclusion of Women for Peace and Security Negotiations & Policy' (Parlemen/Knesset Menyetujui Undang-undang Baru yang Mengharuskan Pelibatan Wanita dalam Perundingan dan Pembuatan Kebijakan Perdamaian dan Keamanan), 21 Juli 2005. <http://www.peacewomen.org/news/Israel-OPT/July05/Knesset.html>
- 36 McGrew, L., Frieson, K. dan Chan, S., Good Governance from the Ground Up: Women's Roles in Post Conflict Cambodia (Tata Pemerintahan yang Baik dari Bawah ke Atas: Peran Wanita di Kamboja Pasca-Konflik), Washington DC: dikutip oleh Powley, E. dan Anderlini, S.N. dalam 'Democracy and Governance' ('Demokrasi dan Tata Pemerintahan') dalam Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit Dukungan dan Tindakan), International Alert and Initiative for Inclusive Security (Kewaspadaan dan Prakarsa Internasional untuk Keamanan Inklusif), 2004, p.36.
- 37 Council of Europe (Dewan Eropa), Gender Budgeting (Penyusunan Anggaran Gender), (Council of Europe [Dewan Eropa]: Strasbourg), 2005, h.10.
- 38 DCAF dan IPU, Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices (Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme, dan Praktik), (DCAF dan IPU: Jenewa), 2003, h.130.
- 39 IPU/UNDP/World Bank Institute (Institut Bank Dunia)/UNIFEM, Parliament, the Budget and Gender (Parlemen, Anggaran, dan Gender), (IPU: Jenewa), 2004, h.61.
- 40 Council of Europe (Dewan Eropa), Gender Budgeting (Penyusunan Anggaran Gender), (Council of Europe [Dewan Eropa]: Strasbourg), 2005, h.14.
- 41 Byanyima, W., 'Politics, Good Governance and Gender: Gender Budgeting Experiences in Three African Countries' ('Politik, Tata Pemerintahan yang Baik dan Gender: Pengalaman Penyusunan Anggaran Gender di

- Tiga Negara Afrika'), Fifth Global Forum on Re-Inventing Government: 'Innovation and Quality in the Government of the 21st Century' (Forum Global Kelima mengenai Perombakan Pemerintahan: 'Inovasi dan Kualitas Pemerintahan Abad 21'), Mexico City 3-7 November 2003, h.3.
- 42 IPU/UNDP/World Bank Institute (Institut Bank Dunia)/UNIFEM, Parliament, the Budget and Gender (Parlemen, Anggaran, dan Gender), h.75.
- 43 Council of Europe (Dewan Eropa), Gender Budgeting (Penyusunan Anggaran Gender), (Council of Europe [Dewan Eropa]: Strasbourg), 2005, h.17-18.
- 44 IPU/UNDP/World Bank Institute (Institut Bank Dunia)/UNIFEM, Parliament, the Budget and Gender (Parlemen, Anggaran, dan Gender), h.44.
- 45 Reeves, H. dan Watch, H., Women's and Gender Budgets: An Annotated Resource List (Anggaran Wanita dan Gender: Daftar Sumber Daya Tambahan), Institute of Development Studies (Institut Kajian Pembangunan), (BRIDGE: Sussex), 1999, h.14.
- 46 Byanyima, 'Politics, Good Governance and Gender' (Politik, Tata Pemerintahan yang Baik dan Gender), h.6-9; World Bank Policy Research Report (Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia), Engendering Development (Penggenderan Pembangunan), 270; IPU/UNDP/World Bank Institute (Institut Bank Dunia)/UNIFEM, Parliament, the Budget and Gender (Parlemen, Anggaran, dan Gender), h. 28.
- 47 Pankhurst, h.20.
- 48 Bouta dan Frerks, h.42.
- 49 UN Division for the Advancement of Women (Divisi PBB untuk Kemajuan Wanita), Laporan, Expert Group Meeting on Peace Agreements as a Means for Promoting Gender Equality and Ensuring Participation of Women. A Framework of Model Provisions (Pertemuan Kelompok Pakar membahas Perjanjian Perdamaian sebagai Cara Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Menjamin Partisipasi Wanita. Kerangka Model Ketentuan), Ottawa, 10-13 November 2003, h.12.
- 50 UN Division for the Advancement of Women (Divisi PBB untuk Kemajuan Wanita), Laporan, Expert Group Meeting on Peace Agreements as a Means for Promoting Gender Equality and Ensuring Participation of Women. A Framework of Model Provisions (Pertemuan Kelompok Pakar membahas Perjanjian Perdamaian sebagai Cara Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Menjamin Partisipasi Wanita. Kerangka Model Ketentuan), Ottawa, 10-13 November 2003, h.8.
- 51 Bouta, T., Frerks, G. dan Bannon, I., Gender, Conflict, and Development (Gender, Konflik, dan Pembangunan), (World Bank [Bank Dunia]: Washington DC), 2004, h.49.
52. Kadaga, A., Deputy Speaker of Parliament (Wakil Juru Bicara Parlemen), Uganda, wawancara pribadi, Jenewa, 19 Oktober 2005.
- 53 IPU/IDEA, Making Reconciliation Work: The Role of Parliaments (Mewujudkan Rekonsiliasi: Peran Parlemen), 2005, h.10.
- 54 Freeman, M., Making Reconciliation Work: The Role of Parliament (Mewujudkan Rekonsiliasi: Peran Parlemen), Handbook for Parliamentarians No. 10 (Buku Pedoman bagi Anggota Parlemen No 10), (IPU/IDEA: Jenewa), 2005, h.11.
- 55 Freeman, M., Making Reconciliation Work: The Role of Parliament (Mewujudkan Rekonsiliasi: Peran Parlemen), Handbook for Parliamentarians No. 10 (Buku Pedoman bagi Anggota Parlemen No 10), (IPU/IDEA: Jenewa), 2005, h.11.
- 56 Anderlini, S.M., Conaway, C.P. dan Kays, L., 'Transitional Justice and Reconciliation' ('Peradilan Transisi dan Rekonsiliasi'), Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit Dukungan dan Tindakan), (International Alert and Women Waging Peace [Kewaspadaan Internasional dan Wanita Pejuang Perdamaian]: Washington DC), 2004, h.9.  
[http://www.womenwagingpeace.net/content/toolkit/chapters/Transitional\\_Justice.pdf](http://www.womenwagingpeace.net/content/toolkit/chapters/Transitional_Justice.pdf)
- 57 Freeman, M., Making Reconciliation Work: The Role of Parliament (Mewujudkan Rekonsiliasi: Peran Parlemen), Handbook for Parliamentarians No. 10 (Buku Pedoman bagi Anggota Parlemen No 10), (IPU/IDEA: Jenewa), 2005, h.12.
- 58 Anderlini, S.M., Conaway, C.P. dan Kays, L., 'Transitional Justice and Reconciliation' ('Peradilan Transisi dan Rekonsiliasi'), Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit Dukungan dan Tindakan), (International Alert and Women Waging Peace [Kewaspadaan Internasional dan Wanita Pejuang Perdamaian]: Washington DC), 2004, h.12.  
[http://www.womenwagingpeace.net/content/toolkit/chapters/Transitional\\_Justice.pdf](http://www.womenwagingpeace.net/content/toolkit/chapters/Transitional_Justice.pdf)
- 59 Goldblatt, B. dan Meintjes, S., 'South African Women Demand the Truth' ('Wanita Afrika Selatan Menuntut Kebenaran'), What Women Do in Wartime: Gender and Conflict in Africa (Apa yang Dilakukan Wanita di Masa Perang: Gender dan Konflik di Afrika), penyunting Turshen, M. dan Twagiramariya, C., (Zed Books: New York), 1998, h.29.
- 60 Pankhurst 21; Anderlini, S.N, Conaway, C.P. dan Kays, L., 'Transitional Justice and Reconciliation' ('Peradilan Transisi dan Rekonsiliasi'), Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit Dukungan dan Tindakan), (International Alert and Women Waging Peace [Kewaspadaan Internasional dan Wanita Pejuang Perdamaian]: Washington DC), 2004, h.6.  
[http://www.womenwagingpeace.net/content/toolkit/chapters/Transitional\\_Justice.pdf](http://www.womenwagingpeace.net/content/toolkit/chapters/Transitional_Justice.pdf)
- 61 Bastick, M., 'Ensuring Women's Involvement in the Full Reconciliation Process' ('Menjamin Keterlibatan Wanita dalam Proses Rekonsiliasi Penuh'), Presentasi dalam Seminar Regional mengenai Peran Anggota Parlemen dalam Proses Rekonsiliasi Nasional di Afrika (Role of Parliamentarians in the National Reconciliation Process in Africa), Bujumbura, Burundi, 7-9 November 2005, h.5.
- 62 Akoun, L., Anggota Parlemen Ivory Coast (Pantai Gading), wawancara pribadi, 19 Oktober 2005.
- 63 Strickland, R. dan Duvvury, N., Gender Equity and Peacebuilding: From Rhetoric to Reality (Kesetaraan Gender dan Pembangunan Perdamaian: Dari Retorika menuju Kenyataan) (International Center for Research on Women [Pusat Penelitian Wanita Internasional: Washington DC], 2003, h.7-8.
- 64 Rehn, E. dan Sirleaf, E.J., Women, War, Peace (Wanita, Perang, Perdamaian) (UNIFEM: New York), 2002, h.11, 13, 16.
- 65 Paragraf ini didasarkan pada Luciak, I., 'Joining Forces for Democratic Governance: Women's Alliance Building for Postwar Reconstruction in Central America'

- (Menyatukan Kekuatan demi Tata Pemerintahan yang Demokratis: Pembangunan Aliansi Wanita untuk Rekonstruksi Pasca-Perang di Amerika Tengah'), Makalah pakar yang disusun untuk Evaluasi 10-Tahun UNRISD atas Konferensi Wanita tahun 2004 di Beijing, UN Research Institute for Social Development (Institut Penelitian Pembangunan Sosial PBB), 2004, h.30.
- <sup>66</sup> Congreso de la República (Parlemen Republik), Bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Partai Persatuan Revolusi Nasional Guatemala [URNG]), *Feminicidio en Guatemala: Crímenes contra la humanidad (Pembunuhan Kaum Perempuan Guatemala: Kejahatan terhadap Kemanusiaan)*, (URNG: Guatemala City), 2005, h.54-56.
- <sup>67</sup> Bouta, Frerks dan Bannon, h.149.
- <sup>68</sup> Correia, M., 'Gender', *Colombia: The Economic Foundation of Peace (Kolombia: Landasan Ekonomi Perdamaian)*, penyunting Guigale, M. Lafourcade, O. dan Luff, C., (World Bank [Bank Dunia]: Washington DC), 2003, h.146, dikutip dalam Bouta, Frerks dan Bannon.
- <sup>69</sup> IPU, Aug. 2007.
- <sup>70</sup> IPU, 'Women in Politics' ('Wanita dalam Politik'), <http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm>  
Mosadiq, 'The New Afghan Constitution' ('Konstitusi Baru Afghan').
- <sup>71</sup> DCAF dan IPU, *Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices (Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme, dan Praktik)*, (DCAF dan IPU: Jenewa), 2003, h.27.
- <sup>72</sup> 'The Swedish Government's Action Plan to Implement Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security' ('Rencana Aksi Pemerintah Swedia untuk Melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1325 mengenai Wanita, Perdamaian, dan Keamanan'), h.3-4.  
[http://www.osce.org/documents/odihr/2006/10/20979\\_en.pdf](http://www.osce.org/documents/odihr/2006/10/20979_en.pdf)
- <sup>73</sup> Urusan Luar Negeri - Kanada, 'Towards a Canadian National Action Plan to Implement Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security' ('Menuju Rencana Aksi Nasional Kanada untuk Melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai Wanita, Perdamaian, dan Keamanan'), *Simposium Tahunan Ketiga Komite urusan Wanita, Perdamaian, dan Keamanan Kanada*, Oktober 2005.







